

**PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM UPAYA KONTRA
RADIKALISME AGAMA DI PROVINSI LAMPUNG MELALUI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
(Studi Pada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung)

(Skripsi)

Oleh
Devina Aprilia



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM UPAYA KONTRA RADIKALISME AGAMA DI PROVINSI LAMPUNG MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Pada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung)

Oleh

DEVINA APRILIA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh posisi Provinsi Lampung yang masuk ke dalam zona rawan radikalisme serta menempati urutan ke empat di Indonesia menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta maraknya kasus penangkapan terorisme yang berafiliasi terhadap organisasi Islam radikal di tengah pandemi covid-19. Hal tersebut berimbas ke beberapa sendi kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik bahkan budaya dan hal tersebut merupakan faktor pemicu timbulnya masalah radikalisme di masyarakat. Peneliti melihat perlunya ada pengembangan terkait upaya kontra radikalisme di tengah masyarakat serta menyertakan organisasi masyarakat sipil seperti Nahdlatul Ulama untuk dapat berkolaborasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor radikalisme di Lampung dan Apakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan NU dapat menjadi upaya kontra radikalisme. Model pendekatan melalui *welfare approach* diharapkan dapat menekan radikalisme di tengah masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun dalam penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor radikalisme di Provinsi Lampung meliputi berbagai faktor baik biologis, ideologis bahkan letak geografis, adapun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PWNU melalui badan otonom dan lembaga-lembaga yang dimilikinya yaitu adalah pengembangan ketrampilan masyarakat disesuaikan dengan potensi yang dimiliki warga dengan mengundang para ahli yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki seperti pelatihan pertanian dan peternakan, dan perikanan, pengembangan produk ketrampilan salah satunya tapis, pelatihan hasil bumi dan potensi yang dimiliki, pelatihan percetakan dan pelatihan media sosial.

Kata kunci: Radikalisme, Kontra Radikalisme, Pemberdayaan Masyarakat, Nahdlatul Ulama,

ABSTRACT

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN EFFORT TO COUNTER RELIGIOUS RADICALISM IN LAMPUNG PROVINCE THROUGH COMMUNITY EMPOWERMENT (Study of the Nahdlatul Ulama Regional Manager of Lampung Province)

Oleh

DEVINA APRILIA

This research is motivated by Lampung Province position which is into the prone of radicalism zone and get fourth place in Indonesia According to the National Counter-Terrorism Agency, and the rise of cases of arresting terrorism affiliated with radical Islamic organizations in the midst of the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic in Indonesia, especially in Lampung Province, has an impact on several aspects of life, such as economic, social, political and even cultural factors and this is a triggering factor for the emergence of radicalism problems in society. Researchers see the need for development related to counter-radicalism efforts in the community and involving civil society groups such as Nahdlatul Ulama to be involved. The approach model through the welfare approach is expected to suppress radicalism in the community through community empowerment which is needed by the community to be able to overcome existing problems. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, while in determining the informants using purposive sampling technique. The results showed that the factors of radicalism in Lampung Province included various factors, both biological, ideological and even geographically tired of Lampung Province itself, the community empowerment carried out by PWNU Lampung Province through its autonomous body and institutions is the development of community skills tailored to the potential of the residents by inviting experts who are adapted to their potential such as training in agriculture and animal husbandry, and fisheries, product development skills include filtering, training on agricultural products and their potential, printing training and social media training.

Keywords: Radicalism, Counter Radicalism, Community Empowerment, Nahdlatul Ulama,

**PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM UPAYA KONTRA
RADIKALISME AGAMA DI PROVINSI LAMPUNG MELALUI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
(Studi Pada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung)

Oleh

DEVINA APRILIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL
TERHADAP UPAYA KONTRA RADIKALISME
AGAMA DI PROVINSI LAMPUNG MELALUI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI
PADA PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL
ULAMA PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **DEVINA APRILIA**

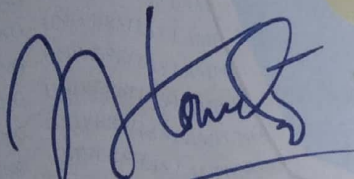
Nomor Pokok Mahasiswa : **1716021068**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

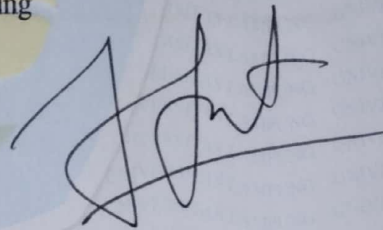
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D

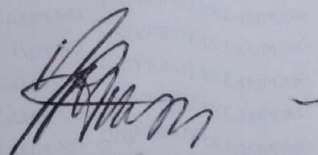
NIP:196010101986031006



Himawan Indrajat, S.IP, M.Si

NIP.198307272009121009

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



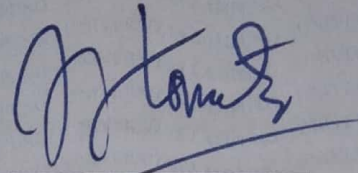
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP 196112181989021001

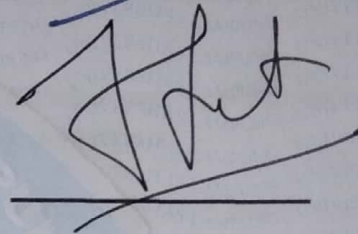
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

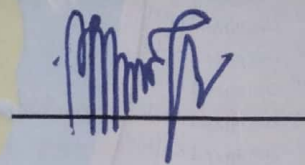
Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D**



Sekretaris : **Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.**



Penguji : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Mei 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



Devina Aprilia

NPM 1716021068

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Devina Aprilia dilahirkan di Bandungbaru, 28 April 2000, sebagai anak pertama dari Bapak Syarifudin dan Ibu Yasini, penulis beralamat tinggal di Kutawaringin, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Adapun jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu:

1. SD N 7 Bandungbaru, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu diselesaikan pada tahun 2011.
2. SMP N 1 Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, kabupaten Pringsewu diselesaikan pada tahun 2014.
3. SMA N 2 Pringsewu, Kecamatan Podosari, Kabupaten Pringsewu diselesaikan pada tahun 2017.
4. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung sampai dengan sekarang.

Selama duduk di bangku perkuliahan penulis mengikuti beberapa organisasi baik organisasi intra kampus maupun organisasi ekstra kampus, adapun organisasi yang pernah diikuti penulis yaitu Forum Silaturahmi Pengembangan Islam (FSPI) Fisip Universitas Lampung pada tahun 2017-2018, adapun organisasi ekstra kampus yang peneliti ikuti yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Lampung dan keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Lampung. Tahun 2020 peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tanjung Mas Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, serta melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

" Hidup tidak usah di buat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup"
(KH. Ahmad Bahaudin Nursalim)

Wong lek senengane nyenengno wong, uripe bakal disenengne Gusti Allah
(Orang yang hidupnya suka membahagiakan orang lain hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah SWT)
(KH. A. Dimiyati Romly)

Dzikir, Fikir, Amal Shaleh
(Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Mamak dan Bapak tercinta
Yasini dan Syarifudin

Terimakasih untuk seluruh sahabat-sahabat yang mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

!

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Organisasi Masyarakat Sipil Terhadap Upaya Kontra Radikalisme Agama di Provinsi Lampung Melalui Pemberdayaan Masyarakat Studi Pada: (PWNU Provinsi Lampung)”, Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik peneliti.
5. Bapak Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D selaku pembimbing utama penulis yang telah banyak memberikan, saran, masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.

6. Bapak Himawan Indrajat, S.IP.,M.Si selaku pembimbing kedua penulis. Terimakasih atas segala kritik, saran, dan bimbingannya sehingga peneliti mampu menyelesaikan sampai tahap akhir skripsi.
7. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP selaku dosen penguji. Terimakasih telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat luar biasa dan sangat membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak/ibu semua. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalamannya. Terimakasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan tauladan yang baik.
9. Terimakasih untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Syarifudin dan Ibu Yasini yang selalu mendoakan anaknya (penulis) dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Terimakasih telah berjuang untuk menjadikan penulis sebagai insan berpendidikan tinggi. Semoga ilmu yang penulis dapatkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dalam menjadi amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Bapak dan Ibu tercinta.
10. Adiku Catrin Ivana semoga kelak kita dapat membanggakan orang tua aamiin
11. Seluruh keluarga besar Bani Trisno Utomo, Terimakasih sudah memberikan do'a, motivasi dan nasehat dan untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 yang telah memberikan pengalaman serta pelajaran berharga selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, khususon sahabat sahabat seperjuangan Keluarga cemara: Fira Maurina Sholihin, Asa Syifatunnisa, Fitri Windasari S.IP, Agung Dwitha Lestari, kalian sahabat-sahabat terbaik.
13. Sahabat-Sahabat terbaik di Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama dan juga partner bahkan saudara yang seperti keluarga di Bandar Lampung yang berada dalam rumah kontrakan yang sama hampir tiga tahun yaitu Fitria Barokah

S.IP, Rita Windarti S.E, Vina Lestari S.Pd, Indah Murnia Sari S.P yang semuanya sering marah marah kalo ngingetin hehe.

14. Seluruh sahabat sahabat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia khususnya rayon FISIP tercinta, sahabat seperjuangan saya: Fitria Barokah S.IP, Muhammad Nur Fahri, Septian Adi Putra S.IP, M. Irfan Arrafii, Siti Habibah, Asa Syifatunisa. serta abang abangku tercinta Bang Igo Ilhamsyah, Bang Rama Rizki, Bang Hernando, dan Bang Irvan Priambada beserta adik adik terkasih di rayon FISIP: Nur Anisa, Rosa, Adinda, Elsa, Febri Setiawan, Gilang Galuh, Januar, Mela, Cucu, Diana, Tasya, Nadia dan masih banyaak sekali terimakasih semuanya sahabat-sahabat.
15. Terimakasih untuk semua yang menyayangi dan mendo'akan penulis.

Bandar Lampung, 3 April 2022
Penulis

Devina Aprilia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Kegunaan Penelitian	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran	18
2.1.1 Pengertian Peran	18
2.1.2 Syarat Peran.....	20
2.2 Radikalisme Agama.....	21
2.2.1 Kajian Radikalisme Agama.....	21
2.2.2 Radikalisasi Agama Wujud Islam Politik di Indonesia.	24
2.3. Konsep Tentang Multikulturalisme	28
2.4. Populisme dan Kaitanya Indonesia sebagai Negara Muslim	29
2.5. Kajian Tentang Pemberdayaan Masyarakat.....	32
2.5.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	32
2.5.2 Asas dan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	34
2.6 Nahdlatul Ulama sebagai <i>Civil Society</i>	37

2.7 Kerangka Pikir.....	39
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	41
3.2 Fokus Penelitian.....	43
3.3 Informan Penelitian	43
3.4 Jenis Data.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisis Data	48
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	49
IV. GAMBARAN UMUM	
4.1 Gambaran Umum Tentang Nahdlatul Ulama	51
4.1.1 Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama.....	51
4.1.2 Tujuan dan Struktur Kepengurusan NU	53
4.2 Gambaran Tentang PWNU Provinsi Lampung	55
4.2.1 Sejarah PWNU Provinsi Lampung.....	55
4.2.2 Perangkat Organisasi PWNU	56
4.2.3 Nama Badan Otonom dan Lembaga PWNU Lampung.....	60
4.2.3.1 Badan Otonom.....	60
4.2.3.2 Lembaga-Lembaga PWNU Lampung	64
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Faktor- faktor radikalisme di Provinsi Lampung	71
5.1.1 Letak Provinsi Lampung yang strategis.....	71
5.1.2 Faktor Biologis (Peristiwa Talang Sari 1989).....	79
5.2 Pemberdayaan Masyarakat Oleh PWNU Provinsi Lampung	87
5.2.1 Kaderisasi di Lingkungan NU Lampung	87
5.2.2 Pemberdayaan Masyarakat Oleh PWNU Lampung	96

VI. PENUTUP	
6.1 Simpulan.....	111
6.2 Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Organisasi Radikal Orde Baru Sampai Dengan Reformasi.....2
2. Daftar Penangkapan Teroris di Lampung Selama Pandemi5

DAFTAR GAMBAR

1. Data Ormas Islam di Indonesia Tahun 2019	11
2. Bagan Kerangka Pikir	40
3. Foto Pendiri Nahdlatul Ulama	53
4. Gambar Provinsi Lampung	70
5. Pelatihan Kader Dasar GP Anshor Pesawaran	80
6. Pelatihan Percetakan dan Kreatifitas Media Oleh PW Lakspesdam	88
7. Pelatihan Pembuatan Kue Oleh Muslimat	92
8. Foto Korban Tragedi Talang Sari	100

DAFTAR SINGKATAN

1. ADART : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga
2. Aswaja : Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah
3. BPS : Badan Pusat Statistika
4. BNPT : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
5. FKAWJ : Forum Komunikasi Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah
6. FKPT : Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme
7. FPI : Front Pembela Islam
8. GP Anshor : Gerakan Pemuda Anshor
9. HAM : Hak Asasi Manusia
10. HTI : Hizbuth Tahrir Indonesia
11. ISNU : Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama
12. ISHARI : Ikatan She Indonesiani Hadra
13. ISIS : Islamic State Of Iraq And Syria
14. IPNU : Ikatana Pelajar Nahdlatul Ulama
15. IPPNU : Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
16. JAD : Jamaah Ansharut Daulah
17. Jatman : Jam'iyah Ahlith Thariqah aI-Muktabarah an-Nahdliyah
18. JI : Jamaah Islamiyah
19. LAZIZNU : Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama
20. LDNU : Lembaga Dakwah NAhdlatul Ulama
21. LBMNU : Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
22. Lesbumi : Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia
23. LTNNU : Lembaga Ta'lif Wan Nasyr

- 24. LKKNU : Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama
- 25. LPNU : Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama
- 26. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
- 27. LSI : Lembaga Survey Indonesia
- 28. LP3ES : Lembaga Penelitian, Pendidikan, Pendidikan, dan
Penerangan Ekonomi dan Sosial
- 29. LAKPESDAM: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber daya
Manusia
- 30. MMI : Majelis Mujahidin Indonesia
- 31. MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 32. MKNU : Madrasah Kader Nahdlatul Ulama
- 33. NII : Negara Islam Indonesia
- 34. NGO : Non Governmental Organization
- 35. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 36. PAC : Pengurus Anak Cabang
- 37. PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- 38. PCNU : Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
- 39. PWNU : Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
- 40. PKPNU : Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama
- 41. PKD : Pelatihan Kader Dasar
- 42. PMII : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- 43. Pergunu : Persatuan Guru Nahdlatul Ulama
- 44. RMINU : Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyyah
- 45. SARA : Suku Agama Ras dan Golongan
- 46. SDM : Sumber Daya Manusia
- 47. SDI : Sarekat Dagang Islam
- 48. UUD : Undang-Undang Dasar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan runtuhnya Orde Baru membuat kesempatan politik semakin terbuka di Indonesia. Sejak awal reformasi tersebut telah mendorong gerakan mobilisasi massa secara transparan dalam ruang publik dan menimbulkan munculnya berbagai macam gerakan sosial secara masif di Indonesia (Qodir, 2014). Kepemimpinan Soeharto yang selama Orde Baru sangat kuat, dominan, serta militeristik, seperti suara masyarakat sipil yang dimandulkan atau dikerdilkan dengan berbagai upaya seperti membonsai partai politik dengan cara membaginya ke beberapa partai besar saja. Begitu pula dengan kalangan dan organisasi masyarakat Islam seperti organisasi masyarakat yang seakan tiarap dan nyaris tak terdengar karena intervensi negara yang terlalu kuat. Seolah ada kesimpulan bahwa berbeda dengan *mainstream* negara adalah berbahaya (Syamsudin & Muh, 2010).

Setelah lengsernya rezim Orde Baru dan bergantinya menjadi reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang dimotori oleh gerakan para mahasiswa, hal ini membuat kran kebebasan berekspresi dalam lingkungan demokrasi selama masa reformasi berkembang dengan cukup leluasa. Reformasi pula telah memberikan ruang terhadap gerakan Islam baik politik maupun keagamaan untuk menyeruak kepermukaan setelah lama dikekang selama masa Orde Baru. Kelompok-kelompok keagamaan yang selama masa Orde Baru terintimidasi dengan berbagai peraturan yang ada dan mencari eksistensi diri dalam ruang publik terbuka serta memanfaatkan iklim demokrasi, tak terkecuali kelompok Islam

yang mengusung paham radikalisme yang membawa konsep kekerasan dalam pencapaian tujuannya serta mengajarkan doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan konsep kemajemukan di Indonesia serta tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Organisasi-organisasi Islam radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Negara Islam Indonesia Atau NII dan masih banyak lagi khususnya yang ada di Indonesia menyebut Pancasila dengan satu istilah yaitu “*thagut*” atau “musuh Islam”, pandangan mereka beranggapan dan menempatkan bahwa Pancasila dijadikan sesembahan untuk masyarakat Indonesia, jelas bahwa para kelompok Islam radikal dalam pemahamannya cenderung ekstrim, tekstualis, dan skriptualis dengan mengabaikan kaidah-kaidah metodologis pemahaman Islam secara komprehensif (Adityo, 2017). Organisasi Islam radikal menilai negara Pancasila sebagai negara yang gagal sehingga ingin mendirikan format baru yaitu negara Islam atau negara khilafah. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh data dan hasil survey nasional tahun 2016 wahid *foundation* yang menyebutkan bahwa ditemukan beberapa organisasi-organisasi Islam radikal yang terbukti menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan kelompok dan organisasinya, antara lain ISIS, Jama’ah Islamiyah Al-Qaeda, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII), Jamaah Ansharut Daullah (JAD), dan Laskar Jihad.

Tabel 1. Organisasi Radikal Kurun Waktu Orde Baru Sampai Dengan Reformasi

Organisasi	Waktu Pendirian	Tokoh Utama	Latar Belakang Pendirian
FKASWJ dan LJ	14 Februari 1998 dan April 2000	Jafar Umar Thalib dan Ayip Safruddin	Respon terhadap kesulitan umat Islam akibat krisis ekonomi dan politik 1997-98; respon terhadap konflik antar agama di Maluku
FPI	17 Agustus 1998	Habib Rizieq	Reaksi terhadap meningkatnya demonstrasi mahasiswa yang menentang Habibie
MMI	07 Agustus 2000	Abu Bakar Ba’asyir, Irfan Awwas dan	Menyediakan wadah gerakan bagi semua aktivis Muslim pro penegakkan Shari’a yang

		Muhammad Thalib	masih terfragmentasi
HTI	Pertengahan 1980	Ismail Yusanto dan Muhammad Khatah	Berkembang bersamaan dengan meningkatnya aktivisme Islam di kampus-kampus besar di Jawa di era 1980an
JI	Awal 1990	Abdullah Sungkar, Riduan Isamudin dan Abdul Aziz	Ketidakpuasan terhadap represi politik Orde Baru dan meningkatnya penindasan atas umat Islam di berbagai belahan dunia

Sumber: Fealey (2004); Barton (2004); Batley (2003); Singh (2003); Jamhari dan Jahroni (2004) (Robingaton, 2017).

Dari tabel di atas jika diamati banyak sekali faktor atau hal yang mendukung lahirnya kelompok radikal, dan bagaimana sebuah kelompok dan organisasi tersebut dapat menyeruak serta tumbuh subur di Indonesia. Beberapa faktor nya ada yang berangkat dari protes terhadap sebuah kondisi yang terjadi saat itu baik dari kemiskinan, penindasan umat Islam dan tindakan represif seperti yang dilakukan oleh Soeharto dengan Orde Barunya, bahkan tindakan represif yang dilakukan Orde Baru terjadi pula di Provinsi Lampung dengan adanya tragedi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer di Talang Sari yang melibatkan kelompok organisasi Islam radikal dengan pemerintah Orde Baru saat itu.

Organisasi-organisasi tersebut hampir keseluruhan merupakan organisasi yang tidak terlegitimasi secara resmi oleh pemerintah, akan tetapi gerakan dari organisasi-organisasi tersebut sangatlah masif dan terkadang tidak segan melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap berada di luar dari kelompok dan organisasi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan beberapa aksi pengeboman beberapa rumah ibadah seperti gereja yang terletak di Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 13-14 Mei 2018 yang pelakunya merupakan ketua dari JAD (Jama'ah Ansharut Daulah) Provinsi Jawa Timur, atau aksi penusukan Wiranto Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabupaten Pandeglang Banten yang pelakunya merupakan pasangan suami isteri anggota dari JAD (Jama'ah Ansharut Daullah) pada 10 Oktober 2019. Adapun Sulawesi yang termasuk

dalam zona merah rawan radikalisme baru-baru ini terdapat aksi pembakaran rumah ibadah dan pembunuhan satu keluarga oleh kelompok teroris yang berafiliasi pada organisasi kelompok radikal Ali Kalora¹

Masalah dan polemik terkait isu radikalisme muncul kembali ketika penayangan film jejak khilafah di nusantara oleh akun youtube Indonesia bersyariah pada tanggal 20 Agustus 2020 diputar, karena pembuat dan penginisiasi film tersebut berasal dari kalangan organisasi yang sudah terindikasi radikal dan sudah secara nyata dibubarkan oleh pemerintah yaitu HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Film yang disebut sebagai film dokumenter dan pelurusan sejarah khilafah di nusantara tersebut mengatakan bahwa kerajaan-kerajaan Islam di nusantara merupakan bagian dari kekhilafahan Turki Utsmani. Hal tersebut sudah sangat jelas merupakan bentuk propaganda organisasi tersebut tentang konsep negara khilafah yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan ini sangat berbahaya bagi masyarakat, khususnya pengguna *social media* yang dapat terpengaruh dan terpapar pemahaman yang menjurus terhadap faham atau ideologi dan pemahaman tentang khilafah Islamiyah yang diusung kelompok HTI tersebut.

Kondisi terkait radikalisme diperparah dengan adanya pandemi covid-19. Adanya wabah pandemi covid-19 di Indonesia bahkan di Provinsi Lampung membuat permasalahan tentang radikalisme bertambah serius karena membuat energi serta fokus dan perhatian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat terkuras habis dan lebih fokus dalam penanganan wabah ini. Hal ini menjadi permasalahan dan dapat dimanfaatkan oleh beberapa kelompok organisasi radikal kembali membuat gerakan secara masif untuk memasukan pemahaman serta ideologi radikal dengan berbagai cara, karena berkurangnya fokus pemerintah dan seluruh elemen masyarakat kepada kelompok tersebut. Terbukti selama pandemi covid-19 ini banyak sekali kasus-kasus

¹Sumber: CNN Indonesia. 2020. Kronologi Kelompok Ali Kalora Bunuh Warga di sigi Sulteng terlampir dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional>. (diakses pada 30 November 2020 pukul 10.36 WIB).

penangkapan teroris serta aksi yang dilakukan oleh para kelompok organisasi radikal baik di Indonesia maupun di Provinsi Lampung khususnya.

Tabel 2. Daftar Penangkapan Tereoris yang Berafiliasi dengan Organisasi Islam Radikal di Provinsi Lampung Selama Pandemi Covid-19)

No	Tanggal Kasus	Nama Tersangka / Nama Organisasi radikal	Lokasi	Jenis Kasus
1.	23-November-2020	Taufik Bulaga (Jamaah Islamiyah)	Seputih Banyak, Lampung Tengah	Ahli Perakit Bom yang Tergabung dalam organisasi Islam Radikal Jamaah Islamiyah yang telah menjadi buronan selama 14 tahun.
2.	7-November-2020	RK, I (Jamaah Islamiyah)	Gading Rejo, Pringsewu	Donatur Kelompok Tereoris POK Imaruddin Banten
3.	6-November-2020	SA, (Jamaah Islamiyah)	Metro	Anggota kelompok Tereoris POK Imaruddin Banten
4.	6-November-2020	S, (Jamaah Islamiyah)	Panjang, Bandar Lampung	Anggota Kelompok Tereoris POK Imaruddin Banten
5.	4- Desember-2020	SG	Kedaton, Bandar Lampung	Belum ada pernyataan resmi dari densus 88
6.	10- Desember-2020	Zulkarnaen, Jamaah Islamiyah	Toto Harjo, Probolinggo, Lampung Timur	Buronan 18 Tahun Kasus Bom Bali I, Panglima Aksari (Kelompok Bersenjata) Jamaah Islamiyah, Terlibat beberapa aksi pengeboman di Indonesia diantaranya Peledakan Bom di Hotel JW Mariot pada 2003, dan Peledakan Bom di Kedutaan Australia di Jakarta pada September 2004.
7.	4- November-2021	Tujuh orang yang berafiliasi	Metro, Lampung	Pendanaan aksi teroris yang didapatkan

		dengan Jamaah Islamiyah	Selatan, Lampung Timur, Pringsewu, Pesawaran	melalui penyebaran kotak amal di Provinsi Lampung
8.	15- Desember-2021	PD (Jamaah Islamiyah)	Bandar Lampung	Berperan dalam pembahasan peleburan struktur darurat Jamaah Islamiyah, serta penyembunyian DPO teroris.

(Sumber: Diolah oleh peneliti 2020)

Dari tabel di atas dapat dikaitkan dengan pernyataan As'ad Said Ali yaitu persoalan yang berhubungan dengan keprihatinan terhadap aspek ekonomi seperti kemiskinan struktural yang melanda sebagian umat, hingga soal pendidikan salah satu akar masalah gerakan radikal di era ini (Ali, 2019), Pernyataan tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Hal ini dapat menjadi peluang bagi kelompok dan organisasi radikal karena dimana negara yang sedang dihadapkan dengan kondisi dan situasi yang sedang carut marut, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, ekonomi melemah, beban negara semakin bertambah dan banyak kesulitan dimana-mana dan tak segan masyarakat merasa marah kepada pemerintah karena tidak bisa mengkoordinir kemauan masyarakatnya satu persatu. Maka akan timbul dari sini rasa kecewa dan saat inilah organisasi dan kelompok radikal masuk untuk memasukan pemahaman masyarakat dan membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah dan memperkenalkan beberapa konsep baru seperti konsep khilafah.

Hal ini sangat unik dan patut diperhatikan karena ketika ada suatu bencana dan wabah seperti pandemi covid-19 yang menyerang Indonesia akan tetapi sesama anak bangsa malah sibuk ribut tentang hal yang seharusnya tidak terjadi di tengah bencana ini dan bersikap seolah benar sendiri. Seperti kasus setelah pulangnya Habib Rizieq Shihab ke Indonesia dan polemik pembubaran organisasi Islam yaitu FPI atau Front Pembela Islam belum lagi rentetan peristiwa yang membersaminya, seperti penembakan 6 laskar FPI

serta banyak kasus terorisme yang terungkap di berbagai daerah di Indonesia salah satunya Provinsi Lampung.

Organisasi-organisasi Islam radikal ini pun sudah menyebar ke hampir seluruh Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Lampung. Hal ini didasarkan pada data survey dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) pada November 2017 menempati posisi tertinggi nomor 4 diantara 5 provinsi di Indonesia yang terpapar Radikalisme, lima provinsi dengan Radikalisme tertinggi tersebut beserta persentasenya adalah Bengkulu (58,58%), Gorontalo (58,48%), Sulawesi Selatan (58,42%), Lampung (58,38%), dan Kalimantan Utara (58,30%). Jelaslah bahwa Provinsi Lampung masuk kepada zona merah rawan Radikalisme dengan menempati urutan ke 4 di antara 5 provinsi yang ada di Indonesia.

Masalah yang lebih serius juga karena kelompok atau organisasi radikal yang ada di Indonesia saat ini sudah nyata-nyata dapat berkamufase, mereka menarik masyarakat dengan mengadakan kegiatan sosial ataupun kegiatan kemanusiaan, dan membuat masyarakat awam tertarik untuk sekedar menyumbangkan uang dalam dalih kegiatan kemanusiaan dan berkedok memberikan sedekah atau bahkan yang lebih serius yaitu bergabung dengan kelompok tersebut. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan sebuah kasus terbaru dengan terbongkarnya ribuan kotak amal yang setelah dilacak ternyata disalurkan kepada kelompok-kelompok teroris seperti kelompok Jamaah Islamiyah atau JI. Data dari Densus 88 terdapat 20 ribu kotak amal yang disebar di 7 Provinsi di 12 wilayah yang berbeda, dan yang lebih memprihatinkan persebaran kotak amal paling banyak ada di Provinsi Lampung dengan jumlah 4 ribu kotak amal².

Terdapat enam daerah di Provinsi Lampung menurut penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang rawan terpapar paham radikalisme yakni, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Hal

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201217142001-12-583422/data-densus-88-20-ribu-kotak-amal-danai-teroris> (diakses pada 29 Januari 2021, pukul 23.15 WIB)

tersebut dikarenakan posisi Provinsi Lampung yang menjadi pintu gerbang antar pulau, baik yang ingin pergi ke Sumatera ataupun yang hendak ke Pulau Jawa, hal tersebut memudahkan organisasi ataupun kelompok radikal berkembang dengan cukup masif dan melakukan persembunyian di Provinsi Lampung.

Maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh NU melalui PWNU dan lembaga di bawahnya dapat menjadi upaya kontra radikalisme agama dalam hal ini khususnya Islam, karena Islam sebagai agama mayoritas, walaupun di Indonesia sendiri aksi dari kelompok-kelompok radikal berbasis agama bukan hanya dari kalangan Islam, seperti pembakaran masjid di Tolikara yang bermotif agama tapi peneliti kali ini ingin melihat bagaimana *civil society* dalam hal ini yaitu Nahdlatul Ulama serta upayanya sebagai sebuah *civil society* di Indonesia melakukan pemberdayaan di dalam masyarakat. Setelah itu apakah strategi pemberdayaan yang dilakukan dan dimiliki NU efektif untuk melakukan kontra radikalisme khususnya melalui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung dan badan otonom dan lembaga di bawahnya.

Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus mengambil langkah ke depan untuk menjaga hubungan agama dengan negara agar tetap harmonis bagi persatuan bangsa berdasarkan Pancasila. Maka perlu adanya keikutsertaan organisasi masyarakat sipil seperti NU yang berperan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menekan radikalisme atau sebagai upaya kontra radikalisme khususnya di Provinsi Lampung. Organisasi-organisasi masyarakat Islam moderat seperti NU harus dan perlu dilibatkan dalam penguatan wawasan kebangsaan sekaligus pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengadakan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya kontra radikalisme agama Islam di tengah masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu solusi terkait masalah radikalisme khususnya di Provinsi Lampung karena menurut Nurjanah dan

Natalia dalam (Syafar, 2017) bahwa sesungguhnya masalah-masalah yang menyangkut hubungan antar umat beragama di Indonesia bukan problem yang terjadi dengan sendirinya tetapi erat juga kaitannya dengan kondisi politik, sosial dan ekonomi khususnya yang ada di Indonesia berasal dan muncul dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang sangat nyata pada masyarakat Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistika jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2021 bertambah dari tahun sebelumnya sejumlah 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dan untuk Provinsi Lampung sendiri data terakhir dari BPS pada September 2020 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung bertambah 12,7% dengan jumlah 1,09 juta jiwa, maka penting mengangkat pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu *problem solving* atau salah satu pemecah masalah dalam menangkal paham radikalisme agama khususnya Islam dan karenanya diperlukan adanya sebuah wadah seperti organisasi kemasyarakatan Islam yang sudah lama mengakar di masyarakat pada umumnya dan berkomitmen dalam meneguhkan dan menjaga NKRI seperti Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama juga merupakan organisasi yang dekat dengan masyarakat baik melalui pesantren-pesantren yang sudah berafiliasi dengan NU maupun badan otonom yang ada di bawahnya seperti banom-banom dan lembaga-lembaga yang masih di bawah naungan NU yang berkaitan dengan profesi masyarakat seperti pedagang, petani, maupun nelayan. Ada pula beberapa lembaga yang fokus terhadap pengembangan masyarakat seperti LAKSPESDAM ada pula yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi yaitu LPNU. Melalui badan otonom dan lembaga yang dimiliki Nahdlatul Ulama yang jumlahnya sangat banyak itulah, disetiap banom dan lembaga tersebut semuanya memiliki program yang sangat berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Mereka yang Terjun langsung membina dan mendampingi masyarakat agar terus maju meretas keterbatasan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Maka penting bagi peneliti melihat bagaimana sebuah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh *civil society* dapat meredam organisasi dan kelompok Islam radikal khususnya di Provinsi Lampung, dan dapat menjadi upaya kontra radikalisme di Provinsi Lampung

Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai kelompok muslim tradisional merupakan salah satu kelompok muslim yang terlebih dahulu berkenalan dan mensosialisasikan konsep *civil society* di Indonesia dibandingkan dengan kelompok dan organisasi Islam modernis seperti Muhammadiyah. Setelah mendapat respon positif konsep *civil society* dalam Nahdlatul Ulama diteruskan melalui para aktivis lembaga kajian dan LSM yang bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat pada lapisan akar rumput perdesaan (Prasetyo & Ali, 2002)

Alasan lain mengapa peneliti memilih Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat sipil yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah, bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia. Hal ini di buktikan dengan hasil riset yang dikeluarkan oleh lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 18-25 Februari 2019, Nahdlatul Ulama didaulat sebagai ormas terbesar di Indonesia bahkan dunia. Pasalnya, hasil survei tersebut menetapkan ormas Nahdlatul Ulama pada posisi teratas dengan jumlah pesentase 49,5%. Bahkan di Provinsi Lampung dalam survey kuadran yang dilakukan pada tahun 2018 menyebutkan presentase jumlah warga Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Survey tersebut menyebutkan bahwa dari jumlah 95,50 % penduduk muslim yang ada di Lampung terdapat sebanyak 72% atau 4,5 juta warga yang mengakui dan menyatakan sebagai warga NU.



*Gambar 1. Data Ormas Islam di Indonesia Tahun 2019
(Sumber: Lingkaran survey Indonesia)*

Jumlah warga atau masyarakat yang banyak tergabung dan mengaku berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama baik di Indonesia dan Provinsi Lampung serta, masalah tingginya radikalisme di Provinsi Lampung yang menempatkannya di urutan ke-4 di Indonesia berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang membuat peneliti ingin meneliti bagaimana peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil yaitu Nahdlatul Ulama data menjadi salah satu upaya kontra radikalisme di Provinsi Lampung, karena paham radikalisme yang di bawa oleh kelompok dan organisasi radikal tidak bisa hanya dilawan dan ditanggulangi dengan cara kekerasan seperti dengan cara menangkap para pelaku atau korban. Akan tetapi perlu adanya upaya atau langkah yang dilakukan untuk membersihkan pemahaman ideologi radikal dari masyarakat menggunakan salah satu organisasi yang telah lama dekat dengan masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama.

Adapun penelitian sebelumnya merupakan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dan dijadikan sebagai landasan untuk penelitian. Dalam hal ini, peneliti berhasil menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang sudah ada yang akan peneliti gunakan sebagai bahan pijakan dan perbandingan antara lain:

1. Skripsi Raja Inal Siregar (2017) Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama dalam membentengi warga nahdliyyin dari radikalisme (studi kasus PCNU Kota Medan). Hasil penelitian tersebut adalah Strategi dakwah PCNU Kota Medan menghadapi beberapa faktor penghalang, pertama cepatnya kemajuan teknologi menjadi pemicu cepatnya faham radikalisme, kedua keterbatasan SDM dalam menjalankan strategi dakwah, ketiga sikap acuh tak acuh dari sebagian masyarakat. Sedangkan faktor pendukung yang bagi PCNU dalam melaksanakan dakwahnya adalah pertama besarnya dukungan pemerintah setempat terhadap strategi dakwah dalam membentengi masyarakat dari faham radikalisme, kedua dukungan dari masyarakat dalam menjalankan strategi dakwah dan kerjasama dalam berbagai kegiatan dengan instansi tertentu, ketiga adanya beberapa pakar dalam bidang ideologi sehingga memudahkan PCNU dalam menjalankan dakwahnya.
2. Skripsi Fuad Hasyim (2018) Peran Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Menangkal Ideologi Islam Radikal (Studi Organisasi di Pengurus Wilayah Provinsi Lampung). Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat peran dari organisasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung dalam upaya penangkalan Ideologi Islam radikal. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan Nahdlatul Ulama Menjabarkan konsep Rahmatan lil alamin dalam 4 falsafah dasar dalam berorganisasi tawasuth/Itidal adalah Kemoderatan yang bercirikan adil, ajeg, seimbang dalam artian tidak condong kiri (liberal) dan tidak pula condong ke kanan (ekstermis agama).
3. Skripsi Fahmil Rozi (2018) *Civil Society* dan Radikalisme (Studi Atas Dukungan Nahdlatul Ulama Terhadap Pembubaran Hizbut tahrir Indonesia). Hasil dari penelitian ini adalah NU sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, memiliki peranan yang sangat penting dalam membendung gerakan radikal yang ingin merubah Pancasila dan UUD 1945. Bagi NU Pancasila, UUD 1945 dan NKRI sudah final. Berbeda hal

nya dengan HTI yang hendak memperjuangkan Negara Islam/Khilafah di Indonesia

4. Skripsi Amin Farih (2019) Konsistensi Nahdlatul Ulama' dalam Mempertahankan Pancasila dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tengah Wacana Negara Islam. Hasil dari penelitian ini adalah NU menolak dengan tegas menolak gagasan khilafah dan konsep Negara Islam di Indonesia, sikap ini sudah ditunjukkan NU dengan menolak kehadiran Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan oleh Kartosuwiryo. Sikap penolakan konsep khilafah ini juga ditunjukkan dengan adanya sikap pengakuan NU yang memutuskan bahwa kedudukan Kepala Negara Republik Indonesia (Ir. Soekarno) sebagai *wāliyy al-amri al-ḍarūri bi al-shawkah* atau pemegang pemerintahan sementara (de facto) dengan kekuasaan penuh dalam Konferensi Nasional Alim Ulama NU di Cipanas tahun 1954 dan Keputusan Mukhtamar NU ke-20 di Surabaya, 8-13 September 1954. Konsistensi sikap yang ditunjukkan oleh NU berlanjut pada Orde Baru dan sampai era reformasi, sekarang ini untuk tetap menolak sistem khilafah.
5. Jurnal Muhammad Akmal Haris (2020) Hasil dari penelitian ini adalah Pandangan dan Konsep Deradikalisasi Beragama Perspektif Nahdlatul Ulama. Pandangan Nahdlatul Ulama menolak dan menentang keras terhadap setiap aksi gerakan radikal terutama dengan dalih jihad atas nama agama. Konsep deradikalisasi yang diterapkan Nahdlatul Ulama dilakukan dengan cara persuasif dengan mengedepankan pendekatan humanis dalam membangun dialog di kalangan internal masyarakat Islam. Misalnya, melalui gerakan dakwah para ulama dan kiai NU, melalui jejaring pesantren, melalui kajian-kajian ilmiah seperti bahtsul masail, media dakwah online NU, serta dengan membentengi lembaga pendidikan NU berbasis Aswaja (Ahlussunah wal Jamaah).
6. Jurnal Adji Seputro (2019) Manajemen Strategi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Menengah Kebawah Dalam Rangka

Menangkal Paham Radikalisme Dan Terorisme Di Era Revolusi Industri 4.0. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi UMKM diharapkan mampu menunjukkan potensi keberhasilan untuk mengatasi dan mencegah terorisme serta sangat berpotensi mengurai masalah masalah fundamental terutama disektor ekonomi.

7. Skripsi Angger Widiyanto (2021) Aktualisasi Falsafah Dasar Nahdlatul Ulama Dalam Melakukan Kontra Fundamentalisme Agama Islam (Studi Pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung). Hasil dari penelitian ini adalah PCNU Kota Bandar Lampung secara tegas menolak atau kontra terhadap paham fundamentalisme agama Islam dan mengaktualisasikan falsafah dasar yang tertuang dalam *khittah* NU 1926 dalam berbagai kegiatan yang berorientasi pada prinsip moderat.

Terdapat tujuh penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai perbandingan dalam penelitian yang akan diteliti peneliti kali ini, berasal dari beberapa skripsi dan jurnal yang berbeda yang semuanya hampir memiliki kesamaan karena terdapat beberapa variabel yang serupa seperti radikalisme dan Nahdlatul Ulama, serta organisasi masyarakat sipil/*civil society*. Begitu pula dengan metodologi yang digunakan hampir semuanya menggunakan metode kualitatif dalam mengolah penelitian tersebut. Akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan ke tujuh penelitian di atas ini karena menggabungkan antara peran dari organisasi masyarakat sipil dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya kontra radikalisme agama Islam di Provinsi Lampung dan penelitian ini dilakukan di tengah pandemi covid-19 yang membuat banyak hal seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, serta budaya mengalami perubahan ke arah yang kurang baik, maka penting bagi peneliti untuk melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PWNU Provinsi Lampung dengan badan otonom dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya melakukan pemberdayaan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang strategi kontra radikalisme agama melalui pemberdayaan masyarakat oleh *civil society* yaitu NU. Peneliti dalam penelitian kali ini mengambil studi organisasi di PWNU Provinsi Lampung dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab radikalisme di Provinsi Lampung ?
2. Apakah peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PWNU Provinsi Lampung dapat menjadi upaya kontra radikalisme di Provinsi Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dari fenomena yang ada dan terjadi saat ini, dan berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat maka, tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab radikalisme di Provinsi Lampung.
2. Mengetahui bagaimana peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PWNU Provinsi Lampung dapat menjadi upaya kontra radikalisme di Provinsi Lampung ?

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan dan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam bidang ilmu politik mengenai gerakan Islam politik yakni Radikalisme Islam khususnya di Provinsi Lampung serta upaya menekan Radikalisme melalui pemberdayaan masyarakat oleh organisasi masyarakat sipil salah satunya Nahdlatul Ulama.

Secara Praktis:

1. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak khususnya PWNU Lampung sebagai salah satu organisasi Islam dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan upaya kontra radikalisme agama melalui program pemberdayaan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung melalui Badan otonom dan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan NU;
2. Sebagai masukan untuk masyarakat luas khususnya masyarakat Provinsi Lampung untuk mengetahui tentang bahaya organisasi dan kelompok radikal serta peta persebaran radikalisme di Provinsi Lampung yang bertentangan dengan konsep heterogenitas Bangsa Indonesia;
3. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk menggandeng organisasi masyarakat sipil salah satunya Nahdlatul Ulama dalam melakukan strategi kontra radikalisme agama melalui program pemberdayaan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem, peran juga merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Selanjutnya adapun teori peran (Sarwono, 2011) adalah

“teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi, dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater, dalam teater seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu”

Sedangkan Biddle dan Thomas (Sarwono, 2011) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, artinya orang tersebut mempunyai suatu peran dalam hubungan interaksi sosial antara yang satu dengan yang lain.
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, artinya dalam proses interaksi seseorang akan berperilaku sesuai dengan kedudukan yang dimiliki.
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku. Seseorang yang memiliki kedudukan atau peran tertentu akan menunjukkan perilaku sesuai dengan peran atau kedudukannya.
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku. Suatu peran pasti dijalankan oleh seseorang yang erat kaitannya dengan perbuatan yang ditunjukkan dalam menjalankan perannya.

Berbagai istilah teori peran tersebut dalam interaksi sosial dan berperilaku dapat dibagi ke dalam dua golongan. *Pertama*, aktor atau pelaku yaitu orang yang sedang berperilaku menjalankan suatu peran tertentu. *Kedua*, target (sasaran) atau orang lain yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Kedua hal tersebut, baik aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kelompok, sehingga dengan adanya hubungan diantara keduanya akan terbentuk interaksi sosial sesuai dengan peran dalam suatu kedudukan tertentu. Akan tetapi pada kali ini peneliti akan melihat peran dari organisasi atau organisasi masyarakat sosial seperti NU dalam melakukan interaksi sosial kepada organisasi masyarakat dalam melakukan perannya terhadap kontra radikalisme yang ada di PWNU melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada dan dilakukan oleh PWNU Provinsi Lampung serta lembaga di bawah naungannya.

2.1.2 Syarat Peran

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu posisi di dalam status sosial dalam menjalankan perannya harus memenuhi syarat-syarat peran yang mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam hal ini berupa rangkaian peraturan-peraturan yang menjadi pedoman seseorang untuk berperilaku dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran dalam arti ini dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat dalam menjalankan suatu organisasi.
- 3) Peran adalah suatu rangkaian teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki keharusan untuk hidup berkelompok dan dalam kehidupan berkelompok pasti akan terjadi interaksi antar anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain yang saling ketergantungan, maka orang yang bersangkutan telah menjalankan peran (Soekanto, 2009).

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sesuatu yang diharapkan oleh lingkungan untuk dilakukan seseorang atau sekelompok orang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Salah satunya peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PWNU Provinsi Lampung dan lembaga lembaga di bawahnya dalam upaya melakukan kontra radikalisme agama Islam.

2.2. Radikalisme Agama

2.2.1 Kajian tentang Radikalisme Agama

Radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah paham yang radikal dalam politik, Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, dan sikap ekstrem dalam aliran politik. Radikalisme dapat dipahami dan dapat diartikan sebagai sebuah respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung dan muncul dalam bentuk evaluasi penolakan atau bahkan perlawanan, masalah-masalah berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dapat dipandang bertanggung jawab terhadap kondisi yang ditolak. Selanjutnya Radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan melainkan terus berupaya mengganti tatanan-tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan lain. Kaum radikal berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut menjadi ganti dari tatanan yang sudah ada. (Mukhlis & Mustofa, 2020).

Adapun radikalisme menurut pandangan Zuly Qodir terutama paham Radikalisme Islam merupakan sebuah proses politik yang mengancam dunia (Islam maupun non Islam) sebagai sebuah gerakan politik keagamaan walaupun begitu radikalisme bukan fenomena yang terjadi di Islam saja, tetapi fenomena global yang melanda dunia ketika kondisi dunia dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi gagasannya dan Radikalisme Islam bisa muncul dan tumbuh karena kondisi sosial politik, ekonomi, sejarah, sekaligus problem psikologi kaum beragama dalam hal ini Islam (Qodir, 2014). Bahkan menurut As'ad Said Ali Radikalisme sejatinya bukan khas Islam, bahkan gerakan-gerakan politik yang berbasiskan ideologi sekuler, di mana saja, baik di Timur maupun Barat. Radikalisme adalah sebuah sikap jiwa dan paham yang mengacu pada gagasan dan tindakan yang bertujuan menumbangkan tatanan mapan dan menggantinya dengan yang baru. Karena itu radikalisme biasanya

berhubungan dengan gagasan-gagasan atau ideologi fundamentalis dan menjadi landasan dari tindakan ekstremisme (Ali, 2019).

Walaupun demikian Menurut kamus ilmiah populer karya Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry mendefinisikan radikalisme sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Dari deskripsi di atas memperlihatkan pengertian radikalisme tidak selalu berkonotasi negatif dan bahkan cenderung positif (Umar N. , 2019). Akan tetapi Radikalisme yang di bahas dalam penelitian kali ini adalah yang memiliki konotasi negatif dan cenderung membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tidak sesuai dengan konteks kemajemukan yang ada di nusantara.

Gerakan radikalisme pada umumnya dan termasuk gerakan radikalisme dalam agama khususnya Islam tidak akan pernah berhenti. Hal ini disebabkan, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Penyebab lahirnya radikalisme adalah penyebarannya dapat bersifat keagamaan, politik, sosial ekonomi, psikis, pemikiran dan lain-lain (Wahid, 2018). Dalam konteks seperti ini, maka penyebab lahirnya radikalisme adalah penyebarannya dapat bersifat keagamaan, politik, sosial ekonomi, psikis, pemikiran dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan :

1. Lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama;
2. Memahami nash/teks wahyu secara tekstual;
3. Memperdebatkan persoalan parsial sehingga mengesampingkan persoalan besar;
4. Berlebihan dalam mengharamkan sesuatu ;
5. Kerancuan konsep;
6. Mempelajari ilmu hanya dari buku dan mempelajari Alquran hanya dari mushhaf;
7. Lemahnya pengetahuan tentang syariah, realitas, sunnatullah dan kehidupan.

Dengan faktor-faktor seperti atas, maka corak pemikiran radikalisme dan indikasinya adalah :

1. Fanatik kepada pendapat, tanpa menghargai pendapat lain;
2. Mewajibkan orang lain untuk melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah SWT;
3. Sikap keras yang tidak pada tempatnya;
4. Sikap keras dan kasar;
5. Berburuk sangka kepada orang lain;
6. Mengkafirkan orang lain.

Penyebab munculnya Radikalisme serta faktor-faktor dan indikasi seseorang yang sudah terpapar radikalisme di atas disadur dari jurnal Abdul Wahid (Wahid M. A., 2018). Saat ini khususnya di masyarakat umum dan awam bahkan kelompok terpelajar seperti mahasiswa rentan dan sudah banyak yang terindikasi menganut paham radikalisme seperti yang disebutkan indikator di atas, seperti yang peneliti ketahui khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Lampung saja banyak yang sudah gandrung dengan kata-kata hijrah dan setelah mereka menyatakan dirinya berhijrah timbul corak pemikiran dan indikasi radikal yang disebutkan oleh Abdul Wahid mereka merasa benar dengan yang mereka anut. Para mahasiswa bahkan sampai memberikan label kafir terhadap sesuatu kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang ia yakini, seperti yasinan, tahlilan, dan pembacaan maulid nabi, yang banyak dilakukan oleh mahasiswa NU di Universitas Lampung seperti Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berafiliasi dengan NU.

Akar dan sejarah Radikalisme Islam di Indonesia berasal dari kondisi ekonomi-politik bukan permasalahan yang berangkat dari teologi agama, (Umar A. R., 2010)

“Adanya pertentangan kelas antara kelas borjuasi yang berwajah “moderat” dan “pro-pemerintah” melawan mereka yang

termarjinalisasi. Hal ini secara nasional dapat kita baca melalui adanya akumulasi kapital di kalangan kelompok pemodal, dan dalam level internasional dapat kita baca melalui skema dependensia antara Indonesia dengan negara-negara yang menjadi hegemoni melalui praktik-praktik ekonomi. Sementara itu, pada basis struktural kita dapat melihat bahwa adanya oligarki elit yang menguasai sumber daya politik dan ekonomi ternyata berdampak pada munculnya kelompok-kelompok yang termarjinalkan dan termiskinkan secara struktural. Hal ini kemudian berdampak pada kesadaran kelas mereka dengan menggunakan “syariat Islam” sebagai basis ajaran sentral yang dapat menggantikan peran negara yang gagal mengantisipasi kesenjangan struktural tersebut”.

Hal tersebut yang membuat peneliti fokus terhadap upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjadi salah satu upaya kontra radikalisme karena, munculnya seseorang terparah oleh paham radikal berangkat dari permasalahan ekonomi politik yang mengakibatkan agama sebagai panduan umat manusia untuk menjalankan hidup digunakan menjadi sebuah alat untuk melawan pemerintah dengan mengganti sistem yang ada di dalamnya menggunakan nama agama khususnya Islam.

2.2.2. Kajian Tentang Radikalisasi Agama Sebagai Wujud Islam Politik di Indonesia.

Radikalisme berkaitan dengan proses dan cara untuk membuat radikal seseorang yakni melalui proses radikalisme sebelum mengenal tentang radikalisme akan lebih baik mengenal tentang arti dan makna radikalisme tersebut. Radikalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah proses atau cara untuk membuat radikal seseorang atau meradikalkan seseorang³. Adapun pengertian lain terkait radikalisme adalah sebuah proses yang dilakukan organisasi radikal untuk mempengaruhi individu dalam mengubah, paham, atau orientasi dan perilaku keagamaannya. Setelah itu individu yang sudah dipengaruhi atau sudah diradikalisme tidak langsung melakukan aksi

³ <https://kbbi.web.id/radikalisasi> (Diakses pada 13 Februari 2020)

kekerasan akan tetapi barulah setelah pemikiran dan pemahaman tentang konsep agama berubah tindakan yang akan dilakukan setelahnya adalah melakukan kekerasan atas dasar jihad atau yang sering kita sebut dengan tindakan terorisme (Arifin, 2014).

Radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok dan organisasi Islam radikal jika di telaah dapat merupakan sebuah bagian dari Islam politik karena seperti yang telah disebutkan menurut Syamsuddin Arif dalam kajian *Saturday Forum* di Insists Jakarta tahun 2017, menyebutkan bahwa, Islam politik menurutnya adalah istilah yang datang untuk melecehkan atau mengolok-olok Islam. Disitu akan dipisahkan dengan Islam teologis, Islam sufistik dan lain-lain. Islam politik dianggap sebagai Ideologi atau gerakan yang ingin mendirikan negara Islam atau menerapkan syariat islam dalam sebuah negara. Misalnya partai-partai Islam⁴. Sebagian diantara mereka menyamakan antara Islamis dan islam politik. Jika di ambil makna dan arti dari pernyataan Syamsuddin Arif dan mengaitkannya dengan apa yang ada di Indonesia ini sangatlah relevan, karena sudah mulai bermunculan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam dan berusaha untuk mendirikan negara Islam seperti Organisasi Negara Islam Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia dan kelompok-kelompok yang berpaham radikal.

Nasaruddin Umar dalam bukunya juga menjelaskan dan mengaitkan tentang Islam Politik pada saat ini dengan cerita tentang perseteruan Sayidina Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awwiyah. Ketika Ali dan Mu'awwiyah berseteru, masing masing tidak ada yang mau mengalah. Ali sudah dilantik menjadi khalifah ke empat tetapi tidak diakui oleh Mu'awiyah, karena tidak ada yang mau mengalah maka terjadilah perang Shiffin. Perang ini merupakan perag saudara dalam dunia

⁴<https://www.hidayatullah.com/berita/berita-dari-anda/read/2016/10/10/102383/syamsuddin-arif-politik-islam-berbeda-dengan-islam-politik.html> (diakses pada 12 November 2020)

Islam dan disebut fitnah terbesar dalam sejarah umat Islam. (Nasarudin Umar, 2019:34)

Amr Ibn Ash yang tahu akan keshalehan Musa dan meminta ia demi kemuliaan dan kemaslahatan umat Islam, sebaiknya Ali dan Mu'awiyah mengundurkan diri lalu dicarikan tokoh yang netral. Abu Musa setuju dan berpidato di depan massa dan pasukan keduanya. Ia menyerukan tidak ada lagi khilafah dan kini saatnya kita akan mencari khilafah yang dapat diterima semua pihak. Akan tetapi Amr Ibn Ash menikung pernyataan tersebut dengan mengatakan, oleh sekarang tidak ada lagi khalifah maka dengan ini kami melegalkan Mu'awiyah sebagai khalifah. Apa yang ditampilkan Amr Ibn Ash itulah contoh Islam politik. Ia mengecoh lawanya dengan menggunakan symbol Al-Qur'an dan bahasa agama. Ia membakar emosi ummat dengan menggunakan ayat dan hadits untuk mencapai kemenangan politik. Ia memojokan orang lain dan membunuh karakter lawan-lawanya dengan Al-Qur'an dan hadis. Maka bisa dikatakan sosok Abu Musa al-asy'ary symbol politik Islam dan Amr Ibn Ash merupakan symbol Islam politik. (Umar N. , 2019).

Islam politik saat ini di Indonesia dapat kita lihat dan amati sedikit demi sedikit pelakunya menginginkan apa yang dilakukan Amr Ibn Ash dan bukan tidak mungkin menumbuhkan kelompok-kelompok radikalisme Islam di Indonesia. Seperti kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok dan akhirnya melahirkan kelompok 212. Kelompok ini bisa kita amati merupakan salah satu Islam politik di Indonesia. Kelompok ini yang awalnya hanya menyerukan hukum dan tangkap penista agama yaitu Ahok menjadi meneriakkan 2019 ganti presiden.

Hal ini jelas menegaskan bahwa organisasi radikal ataupun para kelompok radikal khususnya yang ada di Indonesia dalam upayanya melakukan radikalisasi menggunakan Islam sebagai sebuah alat dan

simbol untuk melakukan dan melanggengkan keinginannya untuk memaksakan kehendaknya yang pasti motifnya adalah mendirikan sebuah konsep negara Islam dan memaksakan syariat Islam berdiri di Indonesia dan fase paling akhir dalam radikalisisasi adalah perbuatan dan aksi terorisme yang akan banyak menimbulkan korban jiwa. Pada penelitian ini peneliti akan fokus terhadap kontra radikalisisasi yaitu bagaimana gerakan radikalisisasi dapat dilakukan pencegahan melalui tindakan preventif atau sebelum terjadi radikalisme kepada individu, adapun pengertian dari kontra radikalisisasi yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 pasal 43 huruf c merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. Kontra radikalisisasi yang dimaksudkan oleh pemerintah ini dikoordinasikan dengan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dalam hal ini yaitu BNPT. Kontra radikalisisasi yang dimaksud dapat dilakukan baik secara langsung maupun dengan kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi (Aisy & Dina Oktarina Ibrahim, 2019). Secara lebih luas, kontra radikalisme dipahami sebagai paket kebijakan atau program baik sosial, politik, hukum, pendidikan, dan ekonomi yang didesain khusus untuk mencegah setiap individu yang berpotensi menjadi radikal.

Perang melawan radikalisme dipahami tidak semata melibatkan perang fisik ataupun militer namun juga melibatkan perang pemikiran atau *battle of ideas*. Perang ini meniscayakan kerjasama pemerintah dengan kelompok-kelompok sipil (*civil society*) baik kelompok-kelompok komunitas, dan NGOs dalam masyarakat (Anwar, 2015). Maka dari itu peneliti dalam penelitian ini meneliti sebuah organisasi masyarakat yang memiliki basis massa besar dan sangat kuat di dalam masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama. NU yang dalam perjalanannya menjadi salah satu Organisasi masyarakat atau *civil society* yang

dengan keras menyuarakan perang terhadap organisasi tersebut selalu mengingatkan akan pentingnya mencintai tanah air dan negara Indonesia dengan slogan NKRI harga mati. Selain itu semua NU memiliki banyak organisasi dan lembaga yang berada di bawahnya dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat yang akan dilihat peneliti sebagai salah satu upaya kontra radikalisme.

2.3 Konsep Tentang Multikulturalisme di Indonesia

Multikulturalisme berasal dari dua suku kata yakni *multi* (plural) dan *cultural* (budaya) multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang pulau-ulaunya tersebar dari Pulau Sabang sampai Pulau Merauke yang di dalamnya terdapat ribuan suku serta bahasa daerah yang beragam, bahkan agama yang dimiliki penduduk Indonesia juga memiliki keragaman terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia bahkan beberapa aliran kepercayaan yang tumbuh di Indonesia semuanya mendapatkan tempat dan berhak menerima haknya sebagai warga Negara Indonesia (Azzuhri, 2012).

Konsep multikulturalisme Indonesia, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan *bhineka tunggal ika* serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Multikulturalisme di Indonesia diharapkan menjadi sebuah kekuatan untuk bangsa Indonesia dan menjadi sebuah kekuatan nasional untuk mengembangkan kekuatan nasional dengan semangat pluralitas, makna pluralitas sendiri memanglah banyak menemukan perdebatan apalagi jika dipertemukan dengan sebuah makna pluralitas agama, karena agama sendiri memiliki akar teologi yang berbeda dan tidak akan menemukan persamaan dalam konteks teologi menurut Majelis Ulama Indonesia. Akan tetapi ada beberapa pengertian makna pluralitas yang dapat diterima mayoritas

masyarakat Indonesia yakni sesuai dengan pendapat dari (Kuswanjono, 2006) bahwa:

“Pluralisme dari pendekatan sosiologis dalam pendekatan ini pluralitas dilihat dari sebuah gambaran tentang realitas masyarakat majemuk yang di situ setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau terjadi asimilasi (pembauran)”.

Pengertian di atas jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia layaknya dapat sesuai dan dapat menjadi kekuatan bagi Bangsa Indonesia, apalagi dengan modal yang dimiliki Indonesia dengan Pancasila yang dimiliki dengan mengacu pada pasal ke tiga yakni Persatuan Indonesia maka dapat dipastikan Multikulturalisme yang dimiliki Indonesia akan terus ada sebagai kekuatan yang dimiliki bangsa ini. Akan tetapi masalah yang lebih serius multikulturalisme Indonesia dapat menjadi kekuatan bagi bangsa ini atau malah bahkan bisa menjadi bumerang yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia apabila keragaman tersebut tidak dibingkai dengan semangat pluralitas dan mementingkan kelompok atau komunitasnya sendiri seperti yang sudah terjadi hari ini, banyak masalah yang timbul akibat hal-hal yang berhubungan dengan isu SARA atau (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Multikulturalisme atau keragaman yang dimiliki Indonesia dapat menjadi sebuah batu loncatan dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal khususnya yang membawa nama agama untuk dapat memecah Bangsa Indonesia dari dalam khususnya agama, seperti yang dijelaskan oleh (Irhandayaningsih, 2012)

“Aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal misalnya, menunjukkan adanya identitas kelompok kultural yang kuat namun memberontak terhadap identitas bersama dan kepentingan rakyat banyak sebagai sesama warga Indonesia. Para teroris mengorbankan kepentingan dan keselamatan sesama warga negara Indonesia untuk memperjuangkan tujuan kelompok kulturalnya sendiri. Kita bisa menilai hal yang sama terjadi pada gerakan-gerakan separatisme di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Memperkuat identitas kelompok

kultural ternyata bisa menabrak kepentingan agenda nasional yang lebih besar, sila ketiga dari Pancasila, yakni persatuan Indonesia”.

Pancasila dapat menjadi sebuah asas dan pegangan bersama untuk merawat multikulturalisme/keragaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun Pancasila juga selalu menjadi persoalan bahkan dipersoalkan oleh kelompok dan organisasi radikal, maka perlu menggandeng salah satu organisasi masyarakat sipil yang dapat turun dan berinteraksi lebih banyak kepada masyarakat yakni Nahdlatul Ulama untuk memberikan pendidikan serta contoh pluralisme dalam keberagaman seperti yang selalu dinyatakan oleh beberapa tokoh NU salah satunya KH. Abdurahman Wahid dalam (Taufani, 2018).

“Di mata Gus Dur, pluralisme adalah sebuah pandangan yang menghargai dan mengakui adanya keragaman identitas, seperti suku, agama, budaya, ras, dll. Pluralisme bukanlah ide yang ingin menyamakan semua agama sebagaimana yang selama ini sering dituduhkan, karena setiap agama tentu memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing. Pluralisme, demikian Gus Dur, tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan seharusnya menjadi sarana bagi manusia untuk memahami anugerah Tuhan agar tercipta toleransi dan harmoni di tengah kehidupan”.

Konsep Pluralisme yang seharusnya terus dimiliki oleh Indonesia untuk membingkai keragaman/multikulturalisme dalam menghadapi berbagai ancaman yang memanfaatkan keberagaman dalam bangsa ini sebagai kelemahan yang dapat diporak-porandakan, khususnya yang membawa nama agama Islam seperti yang di usung oleh para kelompok dan organisasi radikal yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung, maka penting menjaga konsep multikulturalisme dalam bingkai *bhineka tunggal ika* dalam wadah NKRI dengan semangat Pancasila.

2.4. Populisme dan Kaitannya dengan Indonesia sebagai Negara Mayoritas Muslim

Fenomena tentang populisme di Indonesia telah jauh ada sebelum Orde Reformasi bahkan sebelum Orde Baru berkuasa selama 32 tahun di Indonesia di bawah pimpinan Soeharto, akar Populisme Islam di Indonesia

lahir semenjak lahirnya Sarekat Dagang Islam atau SDI yang bergerak dalam bidang ekonomi, SDI bergerak dalam penguatan ekonomi pengusaha muslim, terutama dalam menghadapi kekuatan bisnis Tionghoa yang didukung Belanda. Ketika itu, anggapan umat dimarginalisasi penguasa baik secara politik maupun ekonomi merebak. Populisme Islam di Indonesia bahkan ada dan terus berkembang hingga saat ini bahkan setiap rezim yang berkuasa.

Baru setelah era Reformasi isu Populisme menguat kembali dan dibarengi dengan terbukanya kran Demokrasi di Indonesia, Konsep Populisme menurut Delio dalam (Kusumo, 2018),

“Dipahami sebagai sebuah fenomena sosial dan politik yang muncul dari kalangan orang biasa (*common people*), biasanya mereka yang tidak berpendidikan tinggi, melawan kesenjangan ekonomi, ancaman budaya dari mereka yang memiliki nilai berbeda di dalam negeri dan dari luar negeri, kemapanan elite yang berkuasa (*establishment elites*), dan pemerintah yang tidak bekerja secara efektif untuk mereka”

Populisme di Indonesia sendiri dapat menjadi sebuah ancaman karena Populisme tidak menghendaki adanya masyarakat yang Multikultur tetapi cenderung masyarakat yang homogen atau seragam dan memiliki identitas yang sama, hal ini bertolak belakang dengan Bangsa Indonesia yang cenderung multikultur dan beragama baik dari jenis suku, agama, . Untuk kasus Indonesia Populisme yang menyeruak adalah tentang agama khususnya Islam karena Islam menjadi salah satu agama mayoritas dan sangat sensitif sehingga dapat dijadikan hal yang sangat serius. Walaupun begitu teori terkait Populisme Islam belum begitu mengemuka dalam khazanah keilmuan khususnya kajian ilmu politik, menurut Hadiz Populisme Islam hanya merupakan sebuah varian dari Populisme yang cocok untuk menganalisis sebuah fenomena di sebuah negara yang memang mayoritas berpenduduk Muslim seperti Indonesia (Kusumo, 2018).

Gerakan Radikalisme dan Populisme di Indonesia keduanya merupakan sebuah isu politik yang menandakan lemahnya nilai kewarganegaraan di

Indonesia dan lemahnya Pancasila di hayati dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena Populisme bahkan Radikalisme menandakan sikap egoism yang sangat kentara dan tidak menerima kelompok yang berbeda dari dirinya dan dijadikan alasan serta alat untuk melegitimasi sebuah kekuasaan berdasarkan kelompok dan golongannya seperti Agama Islam. Padahal jelas bahwa nilai Multikulturalisme di Indonesia harus dimiliki dan dipupuk terus menerus supaya integritas dan kemajuan Bangsa dapat dirasakan semua pihak bukan hanya segelintir dan sekelompok orang saja.

2.5. Kajian Tentang Pemberdayaan Masyarakat.

2.5.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto dalam (Makmun & Saddat, 2019) adalah sebuah cara memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*Strengthening*) kepada masyarakat yang (miskin, marjinal, terpinggirkan) yang dilakukan oleh individu maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian perbaikan keterampilan, pengetahuan, penguatan kemampuan yang mendukung supaya bisa terciptanya kemandirian dan keberdayaan untuk memperoleh kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah, baik setiap individu, keluarga, maupun kelompok baik dari segi, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun budaya untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Pemberdayaan dalam berbagai bidang di antaranya: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang sosial.

Adapun pengertian lain terkait pemberdayaan masyarakat juga disampaikan dalam Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan

kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pasal 1, ayat (8) . Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Maka berangkat dari beberapa pengertian terkait pemberdayaan masyarakat tersebut peneliti ingin menggunakan cara pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh *civil society*, dalam hal ini yakni NU khususnya melalui PWNU Provinsi Lampung serta lembaga-lembaga yang berada dalam naungan PWNU Provinsi Lampung untuk menjadi penggerak atau fasilitator kepada masyarakat untuk salah satunya melakukan cara pendekatan kepada masyarakat dalam upaya kontra radikalisme melalui cara memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ ketidak berdayaan dalam masyarakat yang menjadi salah satu terbentuknya bibit bibit radikal di tengah masyarakat.

Salah satu tokoh NU yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia yakni KH. Abdurahman Wahid atau Gus Dur beliau mencetuskan Konsep pemberdayaan masyarakat, konsep pemberdayaan masyarakat yang dibangun oleh Gus Dur setidaknya terdiri dari tiga poin penting yaitu, membangun kesadaran melalui gerakan intelektual, pembangunan sumber daya manusia, dan menciptakan usaha-usaha ekonomi yang diorientasikan kepada kepentingan masyarakat kecil. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dibangun oleh Gus Dur, prinsip kemanusiaan dan keadilan atas hak-hak dasar manusia yang menjadi pondasi utamanya. Hal tersebut menjadi mutlak sebab bagi Gus Dur mengingat Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan. Hal tersebut disarikan dalam tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*) yakni berupa perlindungan atas hak-hak dasar manusia yaitu hak hidup (*hifdz al-nafs*), hak beragama (*hifdz al-din*), hak profesi (*hifdz al-'irdl*), hak berkeluarga (*hifdz al nasl*) dan hak kepemilikan (*hifdz al-maal*) tanpa membeda-bedakan asal usul, ras,

agama dan golongan (Wahyunanto & Arik Dwijayanto, 2021). Inti dari pemikiran Gus Dur terkait pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan dengan beberapa poin yakni nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, toleransi, moderasi dan keseimbangan

Nahdlatul Ulama dalam penelitian ini ingin diteliti sebagai sebuah *civil society* yang dapat dikatakan sesuai dalam membina umat untuk mewujudkan masyarakat menjadi masyarakat madani dan dapat menekan bibit radikalisme yang disemai oleh kelompok dan organisasi radikal khususnya melalui PWNU Provinsi Lampung dan lembaga di bawahnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahkan sudah dijelaskan di atas radikalisme dapat berjalan dengan mudah apabila dalam masyarakat terdapat banyak kesusahan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Setelah itu Radikalisme dapat dengan mudah ditawarkan dan diperkenalkan kepada masyarakat awam sebagai cara dan upaya untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, makmur dan sentosa berdasarkan dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

2.5.2 Asas dan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip yang harus disesuaikan dengan prinsip keadilan sosial dan merupakan penjabaran dari perspektif ekologi dan saling terkait satu sama lain dalam proses pelaksanaannya dan seluruhnya harus saling terkait satu sama lain agar memudahkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah perencanaan sosial perlu berlandaskan pada asas-asas:

1. Komunitas dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan;
2. Mensinergikan strategi komprehensif pemerintah, pihak-pihak terkait (*related parties*) dan partisipasi warga;
3. Membuka akses warga atas bantuan profesional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya agar meningkatkan partisipasi warga;

4. Mengubah perilaku professional agar lebih peka pada kebutuhan, perhatian dan gagasan warga komunitas (Ife, 1995).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah laporannya mengenai konsep dan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, memaparkan sepuluh prinsip yang dianggap dapat diterapkan di seluruh dunia. Sepuluh prinsip tersebut adalah:

1. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat: Program-program (proyek) pertama harus dimulai sebagai jawaban atas kebutuhan yang dirasakan masyarakat luas;
2. Kemajuan lokal dapat dicapai melalui upaya-upaya tak saling terkait dalam setiap bidang dasar, akan tetapi pengembangan masyarakat yang penuh dan seimbang menuntut tindakan bersama dan penyusunan program-program multi tujuan;
3. Perubahan sikap orang-orang adalah sama pentingnya dengan pencapaian kemajuan material dari program-program masyarakat selama tahap awal pembangunan;
4. Pengembangan masyarakat mengarah pada partisipasi orang-orang yang meningkat dan lebih baik dalam masalah-masalah masyarakat, revitalisasi bentuk-bentuk yang ada dari pemerintah lokal yang efektif apabila hal tersebut belum berfungsi;
5. Identifikasi, dorongan semangat, dan pelatihan pemimpin lokal harus menjadi tujuan dasar setiap program;
6. Kepercayaan yang lebih besar pada partisipasi wanita dan kaum muda dalam proyek-proyek pengembangan masyarakat akan memperkuat program-program pembangunan, memaparkannya dalam basis yang luas dan menjamin ekspansi jangka panjang;
7. Agar sepenuhnya efektif, proyek-proyek swadaya masyarakat memerlukan dukungan intensif dan ekstensif dari pemerintah;
8. Penerapan program-program pengembangan masyarakat dalam skala nasional memerlukan pengadopsi kebijakan yang

konsisten, pengaturan administrasi yang spesifik, perekrutan dan pelatihan personil, mobilisasi sumber daya lokal dan nasional, dan organisasi penelitian, eksperimen, dan evaluasi

9. Sumber daya dalam bentuk organisasi-organisasi non pemerintah harus dimanfaatkan penuh dalam program-program pengembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
10. Kemajuan ekonomi dan sosial pada tingkat lokal mensyaratkan pembangunan yang paralel di tingkat nasional.

Walaupun demikian prinsip-prinsip terkait dasar pengembangan atau pemberdayaan masyarakat terdapat variasi antara satu dengan yang lainnya, situasi semacam itu mencerminkan proses bagaimana pentingnya prinsip-prinsip pengembangan masyarakat diterapkan secara efektif dalam konteks lokal (Nasdian, 2015). Pernyataan tersebut memberikan sebuah makna bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dapat berhasil dan efektif apabila dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan lingkungannya, dan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

Prinsip-prinsip tersebut satu persatu akan memberikan keyakinan mendasar bagi mereka yang bekerja secara profesional dalam program-program pengembangan masyarakat, karena program-program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat sekitar akan tetapi supaya program tersebut dapat tertanam dan mengakar dengan kuat harus bersifat lokalitas sesuai dengan daerah program tersebut dilaksanakan agar kemajuan yang akan diperoleh dalam program pemberdayaan masyarakat dapat berhasil.

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan upaya pembangunan warga komunitas dengan melakukan *power sharing* dan kesetaraan dengan berbagai macam *stakeholder* sebagai pelaku perubahannya oleh karena itu semua *stakeholder* harus

mengupayakan proses pembangunan dan memberdayakan warga komunitasnya dari yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok-kelompok sosial, ataupun komunitas guna mencapai hidup lebih baik. Salah satunya yaitu kelompok sosial yang dijadikan sebagai media pemberdayaan, upaya pengembangan masyarakat (*community development*) (Nasdian, 2015), karena pada dasarnya menurut Friedmann kemampuan individu “senasib” untuk mengorganisir diri dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif karena akan terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok.

2.5.3 Metode Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu *The Welfare Approach* yaitu pendekatan yang mengarah pada gagasan kesejahteraan tujuan pendekatan ini adalah terciptanya masyarakat yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, penyakit, kebodohan, dan masa depan yang tidak menentu, *The Development approach* merupakan strategi atau metode dalam pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadaya masyarakat, dan *The Empowerment Approach* merupakan pendekatan yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha untuk memberdayakan atau melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya Menurut Elliot dalam (UNILA, 2017)

Ketiga strategi atau metode di atas dapat digunakan untuk melihat metode manakah yang digunakan oleh PWNU Provinsi Lampung dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat karena strategi pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan memandirikan serta menswadaya masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya lokal yang dimilikinya secara utuh dan omprehensif agar harkat dan martabat lapisan

masyarakat yang kondisinya tidak mampu dapat melepaskan dirinya dari ketidakberdayaan nya di tengah masyarakat yang meliputi individu ataupun anggota kelompok, melalui strategi di atas partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan akan semakin meningkat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat sangat penting karena strategi ini sangat potensial dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi, sosial dan transformasi budaya, karena masyarakat merupakan fokus utama tujuan akhir dari pembangunan sendiri selain itu dapat menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat itu sendiri, partisipasi juga dapat menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaanya akan tidak terungkap, terkait dengan Indonesia sebagai negara demokrasi partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan juga dapat memberikan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. (Muslim, 2007)

2.6 Nahdlatul Ulama sebagai *Civil Society*.

Istilah dan konsep *civil society* awal mula tercetus dan berasal dari sejarah peradaban Barat yakni lebih tepat di Eropa Barat, dan secara historis *civil society* berakar kuat dalam perjalanan intelektual dan sosial Eropa Barat. Inti dari konsep *civil society* disini adalah penolakan terhadap segala jenis otoritarianisme dan totalitarianisme. Oleh karena itu dalam hal ini *civil society* merupakan ruang publik yang berisikan manusia sebagai individu-individu dengan segala atribut intriksinya maka *civil society* memiliki karakteristik yang juga terdapat dalam konsep manusia sebagai individu dan merupakan sebuah ruang publik, karena itu di dalam konsep *civil society* juga harus terdapat kebebasan, kesederajatan, dan nilai-nilai yang terkait seperti otonomi, kesukarelaan atau keseimbangan (Prasetyo & Ali Munhanif, 2002).

Walaupun demikian menurut (Mukhlis, Maulana; Mustofa, Imam, 2020) Istilah *civil society* muncul berbagai macam konsep, sesuai dengan perspektif dan paradigma yang dikembangkan. Sebagian menyebutkan sebagai masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat berbudaya, masyarakat beradab dan sebagainya kemudian mencakup organisasi keagamaan, organisasi berbasis massa, etnis, asosiasi profesional dan lain-lain yang berada di luar aparat negara yang formal.

Namun demikian perkembangan wacana *civil society* di Indonesia pertama kali muncul dari kalangan sarjana Australia melalui sebuah konferensi yang diselenggarakan dengan tema “*state and civil society in contemporary Indonesia*” pada tahun 1988 dan senantiasa melibatkan kaum intelektual muslim. Semangat tersebut disuarakan oleh para kelompok muslim transformis seperti para aktivis LSM, muslim transformis yang memiliki pandangan Islam harus menjadi satu kekuatan bagi pemecahan masalah-masalah kemanusiaan diberbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan juga budaya, muslim transformis lebih memberi perhatian terhadap berbagai pemecahan masalah dan persoalan keterbelakangan yang dihadapi oleh kaum muslim. Setelah mengalami banyak pergulatan kaum muslim transformis juga mengajak kalangan muslim tradisional yaitu Nahdlatul Ulama yang memiliki basis massa khususnya di pedesaan dan pesantren untuk ikut menggalakan dan terlibat dalam program-program pengembangan masyarakat melalui LP3ES pada tahun 1970 (Prasetyo, Hendro; Ali Munhanif, dkk, 2002).

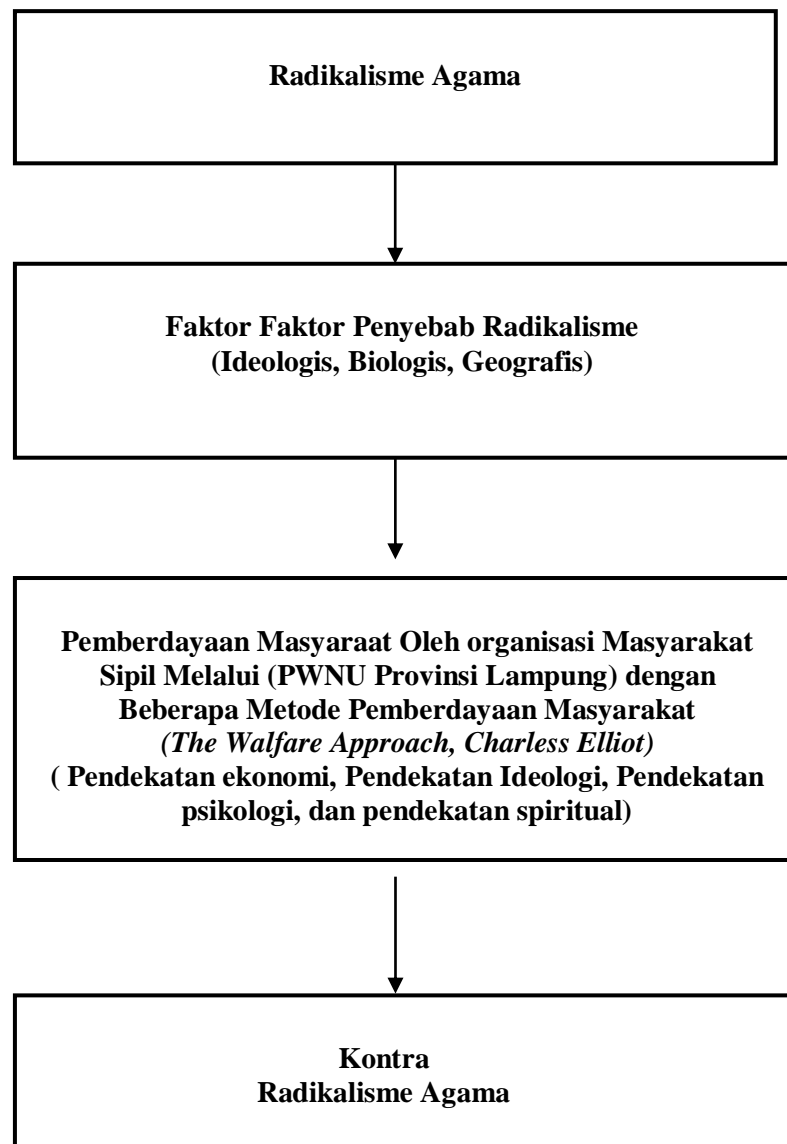
Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi keagamaan, serta organisasi massa yang berada di luar aparat negara atau pemerintah yang sampai sekarang masih terus aktif membangun masyarakat khususnya muslim pedesaan baik melalui pesantren dan lembaga-lembaga di bawahnya dengan berbagai cara dan upaya seperti berbagai macam pelatihan, pemberian pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat yang layak diberikan bantuan melalui program pendidikan melalui pesantren serta perguruan-perguruan tinggi yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Belum lagi beerbagai

macam kegiatan yang dilakukan oleh berbagai badan otonom yang berada di bawah payung NU yang memiliki tugas serta kewajiban dan fungsi yang berbeda, maka penting peneliti melihat bagaimana proses pemberdayaan yang berada di dalam NU khususnya PWNU Provinsi Lampung dan badan serta lembaga yang dibawahnya dalam melakukan program untuk membantu masyarakat untuk berdaya yang merupakan salah satu upaya untuk menekan radikalisme sebagai upaya untuk melakukan kontra radikalisasi agama.

2.7. Kerangka Pikir

Paham radikalisme yang di bawa oleh kelompok dan organisasi Islam radikal di Indonesia melalui upaya radikalisasi agama dengan memanfaatkan berbagai kondisi dan situasi yang ada saat ini, untuk kasus di Indonesia saat ini faktor-faktor penyebab yang menjadi lahirnya radikalisme agama antara lain yaitu faktor keagamaan, kondisi sosial, politik, ekonomi, psikis, pemikiran dan lain lain. Maka dari itu dibutuhkan upaya yang berbeda dalam penanganan masalah radikalisme ini khususnya di Provinsi Lampung melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya untuk melakukan kontra radikalisme Islam di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung melihat salah satu penyebab radikalisme juga beranjak dari kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya yang dirasa sering memarginalisasi kelompok-kelompok tertentu, maka dari itu perlunya menggandeng salah satu organisasi masyarakat yang terbukti dekat dengan masyarakat khususnya Islam dan memiliki pengikut atau jama'ah terbanyak di dunia bahkan yakni Nahdlatul Ulama untuk melakukan sebuah *counter* atau menjadi balasan dan solusi dari permasalahan radikalisme khususnya di Provinsi Lampung.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir
(Sumber: diolah peneliti)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow yakni penelitian yang berkenaan dengan data yang bukan merupakan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan fokus grub, wawancara secara mendalam, dan observasi berperan serta, dalam mengumpulkan data (Sugiyono, 2018).

Menurut Williams menjelaskan penelitian kualitatif bahwa:

“Sebuah pandangan-pandangan dasar (*axioms*) tentang sifat realitas, hubungan peneliti dengan apa yang diteliti, posibilitas penarikan generalisasi posibilitas dalam membangun jalinan hubungan kausal, serta peranan nilai dalam penelitian, karakteristik pendekatan penelitian kualitatif itu memiliki ciri khas tersendiri, dan proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan”, (Hardani & dkk, 2020).

Contoh beberapa *axioms* mengenai penelitian kualitatif diantaranya realitas bersifat ganda, hasil konstruksi dalam pengertian holistik, Interaktif dapat dipisahkan, Hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu, mustahil memisahkan sebab-sebab dengan akibat-akibatnya sebab pada semua keadaan secara simultan, dan yang terakhir adlah tidak bebas nilai (Hardani & dkk, 2020).

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan (Iskandar, 2009). Penelitian kualitatif menurut Creswell sebagai sesuatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, untuk mengetahui gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang umum dan luas. Hasil dari penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan peneliti karena data yang didapatkan diinterpretasikan oleh peneliti. Peneliti adalah sebagai instrumen utama dalam penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2013).

Maka dalam penelitian kali ini dengan mempertimbangkan beberapa pengertian dari penelitian kualitatif yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti ingin melihat bagaimana fenomena radikalisme agama di tengah masyarakat yang dapat mempengaruhi banyak orang, yang disebarkan oleh para kelompok organisasi Islam Radikal yang ada di Indonesia melalui radikalisasi, dan ingin melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh sebuah *civil society* yakni Nahdlatul Ulama dapat berperan dan menjadi salah satu upaya dalam proses kontra radikalisme khususnya di Provinsi Lampung melalui PWNU Provinsi Lampung beserta badan otonom, dan lembaga-lembaga di bawah PWNU Provinsi Lampung.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Moelong fokus penelitian atau pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah

yang dihadapi dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Lestari FA & Kusumadmo E, 2016). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana peran PWNU Provinsi Lampung, banom-banom serta lembaga lembaga di bawahnya dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung yang merupakan salah satu upaya untuk dapat melakukan tindakan kontra radikalisme sekaligus melihat faktor faktor apa saja yang menjadi penyebab radikalisme di Provinsi Lampung.

3.3. Informan Penelitian

Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini berasal dari pengurus PWNU Provinsi Lampung beserta banom dan lembaga di bawahnya yang berkaitan dengan penelitian kali ini yaitu:

1. Sekertaris PWNU Provinsi Lampung (Aryanto Munawar)
2. Ketua/Pengurus Wilayah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Lampung. (Titut Sudiono, Siti Khoiriyah)
3. Ketua/Pengurus Wilayah GP Anshor Provinsi Lampung (Budi Hadi Yanto)
4. Pengurus PW fatayat NU Lampung (Naili, Adilah Hamhij)
5. Pengurus PW Muslimat NU Lampung(Riana)
6. Ketua LTNNU sekaligus penulis buku Talangsari 1989 (Ila Fadhilasari)
7. Ken Setiawan Mantan Jenderal Negara Islam Indonesia.

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana penentuan informan ini ditentukan oleh tujuan yang akan di dapat oleh peneliti dengan mewawancara informan tersebut, karena informan memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diketahui

dalam penelitian tersebut dan dianggap memiliki informasi lebih dengan penelitian yang akan dilakukan. Seperti sekretaris PWNU Provinsi Lampung yang memiliki data dan mengerti terkait data kegiatan yang telah dilakukan oleh PWNU Provinsi Lampung, sedangkan PW LASPESDAM dipilih peneliti karena salah satu lembaga di bawah naungan PWNU Provinsi Lampung yang berfungsi sebagai pengkaji isu-isu strategis dan pemberdayaan manusia untuk transformasi sosial yang berkeadilan dan bermartabat adapun ketua PW GP Anshor dipilih karena dianggap selalu hadir dan berkomitmen dalam urusan menjaga NKRI dari ancaman ideologi di luar Pancasila dan membentengi Aswaja dari ideologi luar seperti radikalisme, dan yang terakhir adalah masyarakat karena masyarakat yang pernah diberdayakan yang akan merasakan dampak pemberdayaan tersebut

Maka dengan mempertimbangkan hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini tingkat homogenitasnya tinggi yaitu satu organisasi saja yaitu Nahdlatul Ulama maka peneliti untuk mendapatkan konstruksi pemikiran dari NU tentang strategi kontra radikalisme agama khususnya Islam melalui pemberdayaan masyarakat oleh Nahdlatul Ulama sebagai *civil society*, mengambil 4 orang informan atau narasumber sudah sangat cukup, akan tetapi informan tersebut menurut peneliti dianggap sesuai dan dapat memberikan informasi lebih terkait masalah yang akan diteliti.

3.4. Jenis Data

Terdapat sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen lain, sedangkan apabila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer yang langsung didapatkan oleh siempunya informasi terkait penelitian dan sumber data sekunder terkait dengan penelitian yang dapat didapatkan dari berbagai dokumen dan segala sumber tertulis (Sugiyono, 2019). Sumber data primer menurut (Hardani, 2020)

dalam sebuah penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Adapun untuk data sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa sebuah laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.

Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yang penulis dapatkan berasal dari wawancara terhadap pengurus PWNU Provinsi Lampung, yaitu sekretaris PWNU Provinsi Lampung, pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Lampung, sekretaris PW GP Anshor Provinsi Lampung secara langsung karena, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dan didapatkan oleh pihak yang bersangkutan secara langsung atau dalam kata lain adalah pihak pertama sesuai dengan panduan wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut (Sugiyono, 2012) mendefinisikan data sekunder sebagai sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Adapun dalam penelitian kali ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku, jurnal, literatur, artikel, serta situs di internet dan beberapa dokumen masa lalu yang dimiliki PWNU dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini seperti program kerja yang telah terlaksana

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah yang paling strategis dalam penelitian, pengumpulan data dapat dilakukan dalam *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari *setting* data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya jika dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data langsung yakni primer dan sumber data sekunder (Hardani, dkk, 2020). Akan tetapi dalam penelitian kualitatif pengumpulan data pada *natural setting* atau kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018).

1. Wawancara

Pengertian wawancara adalah sebagai berikut, suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden, wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interview* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan atau bisa disebut dengan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dan memiliki maksud tertentu (Hardani, dkk, 2020). Melihat hal ini penulis menggali informasi yang akan diperoleh terkait strategi kontra radikalisme agama melalui pemberdayaan masyarakat oleh *civil society* yaitu Nahdlatul Ulama kepada responden yang dipilih yaitu pengurus PWNU Provinsi Lampung yakni sekretaris umum, serta lembaga dan badan otonom di bawah PWNU Provinsi Lampung yakni PW LAKSPESDAM Lampung dan PW GP Anshor Lampung, Fatayat, Muslimat, dan LTNNU

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, atau dengan mudah yang biasa

disebut dengan kumpulan dokumen-dokumen objek yang diteliti dan merupakan data sekunder berbeda dengan teknik pengumpulan data sebelumnya yang merupakan sumber data primer karena didapatkan dari narasumber secara langsung.

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data-data yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian, dan merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Seperti dokumen-dokumen yang dimiliki PWNU Provinsi Lampung, Undang-Undang yang terkait, dokumen digunakan sebagai sumber data penunjang karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan memperkuat.

Moloeng dalam (Hardani, dkk, 2020) menyatakan bahwa dokumen itu dapat dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan, sedangkan dokumen resmi berbentuk seperti catatan-catatan yang sifat dan isinya bersifat formal seperti aturan sebuah lembaga, ataupun berita yang diberitakan ke masyarakat melalui media massa.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Menurut Mathew B. Miles dan Michael Huberman dalam (Hardani & dkk, 2020) analisis data kualitatif yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan yang terlibat, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap

menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya atau disebut dengan triangulasi data. Pengumpulan data untuk penelitian kualitatif dapat dilakukan sehari-hari, berbulan-bulan, sehingga data yang didapatkan dapat diperoleh dengan banyak dan bervariasi (Sugiyono, 2018).

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, merangkum, memilih, pengabstrakan, dan transformasi data yang pokok dan sesuai dengan tema dan fokus penelitian kualitatif yang muncul dari catatan-catatan di lapangan setelah pengumpulan data atau *data collection* (Sugiyono, 2018) Sedangkan menurut Riyant menyatakan bahwa reduksi data artinya, data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstraksikan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.

4. Kesimpulan data

Langkah ketiga dari analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan

pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif, dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi ada kemungkinan juga tidak dan merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Hardani, dkk, 2020)

3.7. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2018). Pada penelitian kali ini penulis menggunakan dua uji keabsahan data yakni uji kredibilitas dengan *transformability*

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang (responden) yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung (Hardani, dkk, 2020). Uji ini juga dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi serta analisis, peneliti juga mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari badan otonom serta lembaga di bawah naungan PWNU Provinsi Lampung yang berbeda.

2. *Transformability*

Menurut Moelong dalam (Hardani & dkk, 2020) kriteria ini untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu dimana penelitian dilakukan dapat diaplikasikan atau di transfer kepada konteks atau setting yang lain untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uraian rinci, atau dengan kata lain peneliti harus dapat menyusun laporannya dengan sebaik mungkin bukan hanya rinci tapi juga harus jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Maka dengan begitu pembaca peneliti kualitatif tersebut dapat secara jelas memahami dan dapat memutuskan apakah penelitian tersebut dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan penelitian tersebut di tempat lain.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Tentang Nahdlatul Ulama

4.1.1 Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama

Terbentuknya organisasi masyarakat Islam tradisional yakni Nahdlatul Ulama beranjak dari sebuah keadaan Islam Indonesia pada awal abad XX yang mengakibatkan sebuah gerakan reformasi gelombang kedua yang datang dari Mesir (*salafiyah*, yang berarti “kembali ke jalan para leluhur”) ke Indonesia, kemudian para syekh dan kiai sendiri yang menjadi sasaran reformasi dari gelombang kedua tersebut selanjutnya melahirkan organisasi seperti Muhammadiyah tahun 1912 yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, kemudian Al-Irsyad tahun 1915 dan Persatuan Islam (Persis) 1923, selanjutnya dengan adanya gelombang reformasi kedua yang melahirkan beberapa organisasi tersebut yang bisa disebut dengan kaum reformis mereka menentang beberapa hal dan aspek yang telah menjadi budaya di Indonesia seperti berziarah ke makam para wali dan kepercayaan terhadap kemampuan mereka sebagai perantara berhubungan dengan Allah, *tahlilan* (Upacara bagi kematian), selamatan, dan sesaji ataupun cara lain untuk memohon keselamatan. Para kaum reformis tersebut juga mengutamakan penekanan untuk kembali pada Al Qur’an dan hadith’s dan tidak mengakui otoritas para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat (*taqlid*) dan ketaatan buta terhadap hukum fiqh karya imam 4 mazhab. Hal inilah yang menjadi perdebatan dan menjadikan perbedaan pendapat diantara kaum reformis atau kaum muda dengan kaum tua sebagai penganut tradisi (Feillard, 1999)

Pada saat itu pula para ulama tradisional belum terorganisasi walaupun mereka memiliki kedekatan yang begitu erat, maka pada awal abad XX KH. Abdul Wahab Hasbullah mengorganisir Islam Tradisionalis dengan dukungan Kiai yang sangat disegani dari Jombang yakni KH. Hasyim Asy'ari beliau Kiai Wahab aktif dalam Sarekat Islam yakni perkumpulan saudagar muslim di Suarakarta, dan ada tahun 1916 beliau mendirikan madrasah bernama Nahdlatul Wathan yang berhasil menggebleng para remaja dengan sebutan jam'iyah Nashihin, dan inilah yang menjadi cikal bakal dan modal pertama dalam perjuangan Islam kaum *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*. Kiai Wahab juga membentuk sebuah koperasi untuk para pedagang dengan nama *Nahdlatul Tujjar* di tahun 1918 setahun kemudia tepatnya tahun 1919 di daerah Ampel Surabaya berdiri madrasah baru dengan nama *Tashwirul Afkar* yakni madrasah yang dipergunakan untuk anak-anak mengaji dan belajar sekaligus sebagai sayap untuk membela kepentingan kaum tradisionalis (*Idem, 1999*).

Adanya perdebatan antara kaum reformis dengan para ulama tradisionalis terjadi kembali pada tahun-tahun dua puluhan dikarenakan Kiai Wahab berhadapan dengan guru dari kalangan Reformis dari Al Irsyad yakni Achmad Soorkati, seorang guru agama dari Sudan, Afrika Timur dan Achmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dalam forum Sarekat Islam terkait pentingnya gagasan modernisasi sistem pendidikan dan meninggalkan mazhab, akan tetapi Kiai Wahab dan KH. Hasyim Asy'ari menyetujui bagian tentang modernisasi sistem pendidikan walaupun tetap tidak menerima dan tetap menolak meninggalkan mazhab, kongres Al Islam di Cirebon tahun 1922 juga menjadikan panggung perdebatan antara dua golongan dimana tuduhan "kafir" dan "Syirik" terdengar maka dari itu Kiai Wahab mengusulkan suatu wadah untuk para Ulama tradisionalis akan tetapi KH Hasyim Asy'ari menolaknya, baru pada dua tahun berikutnya terjadi peristiwa besar di Timur Tengah yaitu penghapusan khalifah oleh turki dan

serbuan kaum wahabi ke Mekah. Setelah itu pada tahun 1926 pada Kongres Al-Islam di Bandung ingin mengirimkan dua delegasi untuk menemui raja Saud dan Kiai Wahab menyarakan agar usul-usul kaum tradisional dapat dibawa tetapi ditolak dan mengakibatkan kaum tradisional terpojok dan terpaksa memperjuangkan kepentingan mereka dengan cara mereka sendiri untuk menemui Raja Ibn SA'ud, maka pada tanggal 31 Januari 1926 diputuskan untuk membentuk suatu organisasi yang mewakili kaum tradisional yaitu (NO) Nahdlatul Ulama (*Idem, 1999*).



*Gambar 3. Foto 3 Pendiri Nahdlatul Ulama
(KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Hasyim Asy'ari, KH Bisri Syansuri)
(Sumber: Tirto.id)*

4.1.2 Tujuan serta Struktur Kepengurusan Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah perkumpulan/*jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia berdasarkan ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta dengan berbagai usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Bidang agama , menguayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah
- b. Bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara
- c. Bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*).
- d. Bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khairu Ummah*

Setiap organisasi pastilah akan memiliki struktur kepengurusan begitu pula dengan NU yang memiliki struktur dari tingkat pusat sampai tingkat desa/kelurahan atau yang biasa disebut ranting adapun struktur kepengurusan dalam NU adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Besar yang berada di tingkat pusat
2. Pengurus Wilayah yang berada di tingkat Provinsi
Pengurus Cabang yang berada pada tingkat kabupaten atau kota
3. Pengurus Cabang Istimewa yang berkedudukan di luar negri
4. Pengurus Wakil Cabang yang berada pada tingkat kecamatan
5. Pengurus Ranting yang berada pada desa atau kelurahan
6. Penguuru Anak Ranting yang berkedudukan di dusun ataupun kelompok

Adapun untuk tingkat pusat, wilayah, cabang, dan majelis wakil cabang setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Mustasyar (Penasehat)
2. Syuriah (Pimpinan Tertinggi)
3. Tanfidziyah (Pelaksana Harian)

Adapun dalam tingkat ranting terdiri dari:

1. Syuriah (Pimpinan Tertinggi)
2. Tanfidziyah (Pelaksana Harian)

4.2 Gambaran Tentang PWNU Provinsi Lampung

4.2.1 Sejarah PWNU Provinsi Lampung

Pendirian PWNU Provinsi Lampung tidak terlepas dari terpisahnya Provinsi Lampung dari Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1964, maka Pengurus Besar Nahdlatu Ulama mengirimkan surat mandataris kepada KH. Muhammad Zakri untuk membentuk kepengurusan NU di Provinsi Lampung. Saat pertama kepengurusan NU Lampung dibentuk terdapat tujuh cabang diantaranya:

1. Cabang Teluk Betung;
2. Cabang Kotabumi;
3. Cabang Menggala;
4. Cabang krui;
5. Cabang Kota Agung;
6. Cabang Talang Padang;
7. Cabang Sukarame.

Perkembangan jumlah cabang yang terdapat dalam naungan PWNU Provinsi Lampung bertambah seiring berkembang dan bertambahnya kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung hampir setiap kabupaten dan kota memiliki cabang tersendiri mulai dari PCNU

Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Barat, Lampung Timur, Krui Pesisir Barat, Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. PWNU Provinsi Lampung yang dalam perkembangannya juga memiliki berbagai bada otonom, lembaga serta Lajnah yang keperluanya dibentuk sesuai dengan kebutuhan suatu wilayah.

4.2.2 Perangkat Organisasi PWNU Provinsi Lampung

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung sudah mengalami sepuluh pergantian kepemimpinan semenjak tahun 1964 sampai dengan sekarang adapun ketua Tanfidziyah PWNU Provinsi Lampung dari waktu ke waktu adalah:

- a. Tahun 1964 – 1968 diketuai oleh H. Marhusen.
- b. Tahun 1968 – 1979 diketuai oleh KH. Zahri.
- c. Tahun 1979 – 1983 diketuai oleh H. Volta Jeli Panglima.
- d. Tahun 1983 – 1992 diketuai oleh Drs. Ramos Jaya Saputra.
- e. Tahun 1992 – 1997 diketuai oleh H. Khusnan Mustofa Gufron.
- f. Tahun 1997 – 2002 diketuai oleh H. Khusnan Mustofa Gufron.
- g. Tahun 2002 – 2007 diketuai oleh Drs. H. Khairudin Tahmid, M. H.
- h. Tahun 2007 – 2012 diketuai oleh KH. Ngaliman Marzuqi.
- i. Tahun 2012 – 2017 diketuai oleh KH RM Sholeh Bajuri, SHI.
- j. Tahun 2018-2023 diketuai oleh Prof. Dr. Mukri , M.Ag

Adapun susunan kepengurusan PWNU Provinsi Lampung tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Mustasyar

1. KH. Ahmad Shodiq
2. KH. Arif Mahya
3. KH. Syamsuddin Thohir
4. KH. Makruf Adnan

5. KH. Mohammad Shobari
6. KH. Hamdan Ma'mun
7. KH. Abdullah Syahid, MA
8. Brigjen Pol. (Purn) Drs. Edward Syah Pemong, SH. MH.
9. Drs. KH. Hafidhuddin Hanief
10. H. Mukhtar Luthfi, SH Muhammad Alzier Dianis Thabrani
11. Dr. H. M. Nasrullah Yusuf, SE., M.B.A
12. Drs. KH. Muhammad Ikhwan Asron, MA
13. Dr. H. Fauzi Thoha
14. Drs. H. Mukhlis Basri, MM

Syuriyah:

1. Rais: KH. Muhsin Abdlllah
2. Wakil Rais: KH. RM. Soleh Bajuri, SHI.,MHI
3. Wakil Rais: Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH
4. Wakil Rais: KH. Ridwan Syueb
5. Wakil Rais: KH. Marzuki Amin
6. Wakil Rais: KH. Sya'roni
7. Wakil Rais: Dr. KH. Moh. Bahrudin, M.Ag.
8. Wakil Rais: Dr. KH. Ainul Ghoni, S.Ag., SH, M.Ag.
9. Wakil Rais: KH. Ihya Ulumuddin, S.Pd.l., M.Pd.l
10. Wakil Rais: KH. Mahmuddin Bunyamin, Lc., MA.
11. Wakil Rais: Drs. KH. Dimiyati Amin
12. Wakil Rais: Drs. KH. Agus Saiful Islam
13. Wakil Rais: KH. Wahid Zamas
14. Wakil Rais: KH. Syaiful Mudjab Wakil Rais: KH. Syukron Ma'mun
15. Wakil Rais: KH. Syodikul Amin
16. Wakil Rais: KH. Sya'dullah Katib : KH. Basyaruddin Maisir AM
17. Wakil Katib : KH. Ahmad Ma'shum Abror, M.Pd.l
18. Wakil Katib : KH. Syaikhul Ulum Syuhada
19. Wakil Katib : KH. Umar Ansori Khusnan Musthafa Ghufuran
20. Wakil Katib : KH. Abdul Kholiq Nasrullah

21. Wakil Katib : Dr. Abdul Ghofur, M.Ag.
22. Wakil Katib : H. Kamran As'ad, Lc., M.Ag.

A'wan

1. Idhan Djanuwardhana. SH.. MH.
2. Dr. Afif Ansori, M.Ag.
3. Hanif, SE., MM.
4. H. Sholihin, s.Ag., M.Ag
5. Alhuda Muhajirin Drs.
6. KH. Nasruddin Ma'sum, M.Ag.
7. Dr. Isnaini Ahmad Rofiqi Jamaluddin
8. H. Muhammad Supriyadi, S.Pd.
9. Drs. H. Arfan Adni, MH.
10. Drs. H. Wirham Riyadi, MM.
11. Drs. H. Badaruddin
12. Drs. H. M. Masdar MS, MM.
13. Drs. H. Syamsul Hadi Dzikro, S.P, ME.

Tanfidziyah

1. Ketua: Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag.

1. Wakil Ketua: KH. Ahmad Sujadi Sadad, MA
2. Wakil Ketua: H. Daldiri Ahmad Syam, S.Pd.l
3. Wakil Ketua: Prof. Dr. H. Karomani, M.Si
4. Wakil Ketua: Dr. H. Muhammad Kadafi, SH., MH.
5. Wakil Ketua: Dr. Abdul Syukur, M.Ag.
6. Wakil Ketua: dr. H. Achmad Farikh
7. Wakil Ketua: Dr. Alamsyah, M.Ag.
8. Wakil Ketua: Juwendra Asdiansyah
9. Wakil Ketua: Prof. Dr. Wan Jamaluddin
10. Wakil Ketua: Dr. Ir. H. Saronno, M.Si.
11. Wakil Ketua: H. Khaidir Bujung, S.Ag.
12. Wakil Ketua: Teguh Wibowo, S.Tp

13. Wakil Ketua: Ir. H. M. Irpandi

Sekretaris: Drs. H. Aryanto Munawar

1. Wakil Sekretaris: Hayatul Islam, SE.
2. Wakil Sekretaris: Muhyidin Penata Gemilang, SE
3. Wakil Sekretaris: Mashuri, S.P.
4. Wakil Sekretaris: Maskut Candranegara, S.Pd.I
5. Wakil Sekretaris: H. Maulana Mukhlis, S.IP., M.IP
6. Wakil Sekretaris: Dr. Safari Daud, S.Ag., M.Ag.
7. Wakil Sekretaris: KH. Ma'shum Asrori
8. Wakil Sekretaris: Iwan Sastriawan, SH., MH.
9. Wakil Sekretaris: Muhyidin Thohir. S.Ag., MH.

Bendahara: Dr. H. Andi Warisno, M.Pd.I

1. Wakil Bendahara: H. Syukri Hadi
2. Wakil Bendahara: Arifin Gunawan, SE.
3. Wakil Bendahara: Khalifah Darmawan, SE.
4. Wakil Bendahara: Puji Raharjo Soekarno, S.Ag., SS., M.Hum.
5. Wakil Bendahara: Mohammad Irfandi Romas, S.Sos
6. Wakil Bendahara: Arif Priyono. SE.

4.2.3 Nama Badan Otonom, Lembaga, dan PWNU Provinsi Lampung

4.2.3.1 Badan Otonom

a. Muslimat

Muslimat Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial keagamaan dan merupakan salah satu Badan Otonom dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan saat ini di tingkat nasional diketuai oleh Ketua Umum Hj. Khofifah Indar Parawansa adapun di PW Muslimat Lampung diketuai oleh

Dwiningsih Sumarno, PW Muslimat memiliki Visi mewujudkan masyarakat sejahtera berkualitas, dijiwai ajaran Ahlusunnah Wal Jama'ah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diridhoi Allah SWT dan misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang bertaqwa kepada Allah SWT, berkualitas dan mandiri,
2. mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang sadar akan hak dan kewajibannya baik sebagai pribadi, warga negara maupun anggota masyarakat sesuai ajaran Islam.
3. Melaksanakan tujuan Jam'iyah NU untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, bermartabat dan diridloi Allah SWT.
4. Membumikan Islam Rahmatan Lil'Alamin sebagai gerakan moral Dakwah Muslimat Nahdlatul Ulama.

b. GP Anshor

Gerakan Pemuda (GP) Anshor adalah organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang berwatak kerakyatan. Gerakan Pemuda Anshor atau disingkat GP Anshor adalah badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama (NU), saat ini PW GP Anshor diketuai oleh Haidir Ibrahim. Adapun tujuan dari GP Anshor:

1. Membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih.

2. Menegakkan ajaran Ahlul Sunnah wal Jama'ah dengan menempuh manhaj salah satu madzhab empat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, berkemakmuran, berkemanusiaan, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang di ridhoi Allah SWT.

GP Anshor memiliki potensi serta modal sosial yang sangat besar jika dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh GP Ansor tentu akan memiliki dampak yang amat besar bagi perkembangan kehidupan, baik dari segi sosial, ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi di masyarakat seperti yang dilakukan oleh Anshor Pesawaran dengan memberdayakan keekonomian masyarakat dengan penjualan oli ke bengkel bengkel yang ada di Pesawaran.

c. Fatayat

Fatayat NU merupakan salah satu organisasi perempuan bagian dari organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu NU. Dengan demikian Fatayat NU mempunyai prinsip keorganisasian yang sama dengan NU yaitu lebih berpegang teguh kepada doktrin toleransi, akomodatif dan berupaya memperjuangkan tradisi pengamalan dan pemahaman ajaran Islam yang sesuai dengan budaya Indonesia. Dengan kata lain, NU menetapkan diri sebagai pengawal tradisi dengan mempertahankan faham Ahlu Sunnah wal Jama'ah.

d. IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama)

Anggota IPNU adalah pelajar dan santri laki-laki NU yang berusia maksimal 27 tahun. Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syari'at Islam menurut faham AhlulSunnah wal Jama'ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

e. IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama)

Anggota IPPNU adalah pelajar dan santri perempuan NU yang berusia maksimal 27 tahun. Sebagai wadah berhimpun pelajar dan santri putri NU untuk melanjutkan semangat, jiwa dan nilai-nilai Nahdliyyin. Sebagai wadah komunikasi pelajar dan santri putri NU untuk menggalang ukhuwah Islamiyah dan Syiar Islam.

f. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)

Anggota PMII merupakan mahasiswa dan PMII dengan tujuan PMII terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

g. Jam'iyah Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (Jatman)

Banom ini bertugas sebagai pelaksana kebijakan NU dalam pengamalan dan pengembangan tasawuf. Tujuan organisasi ini adalah: mengusahakan berlakunya syariat Islam lahir dan batin dengan berhaluan AhlulSunnah wal Jamaah yang berpegang

kepada salah satu mazhab empat; mempergiat dan meningkatkan amal saleh lahir dan batin menurut ajaran ulama shalihin dengan suatu janji setia (bai'ah shalihah); menyelenggarakan pengajian (khusus) dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat (ulumun nafi'ah).

h. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

ISNU merupakan banom pelaksana kebijakan NU dalam pengembangan, penerapan, dan tanggung jawab keilmuan, Adapun gerakan ISNU yang pertama, meningkatkan capacity building di bidang sumber daya manusia. Adapun program-programnya adalah pelatihan kewirausahaan, manajerial leadership, dan lainnya. Kedua, konsolidasi program di bidang intelektualitas. ISNU adalah organisasi yang base nya adalah intelektuality sehingga intelektualitas harus bisa menjadi bagian dari branding. Diantara programnya adalah menghubungkan mereka yang ingin mendapatkan beasiswa ke S2 dan S3. Ketiga, advokasi Undang-Undang. ISNU juga concern melakukan advokasi perundang-undangan yang ada seperti UU Minerba, Wakaf, dan lainnya. Keempat, bidang ekonomi. Sebuah organisasi harus memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi agar tidak mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan di luar.

i. Pencak Silat Pagar Nusa

Merupakan banom NU yang bertugas mengembangkan bela diri di lingkungan Nahdliyyin.

j. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu)

Banom ini ditugaskan NU untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan ustaz dan guru. Konferensi Lembaga Pendidikan

Ma'arif NU pada tahun 1952 mekomendasikan untuk membentuk organisasi guru NU. Selanjutnya, Ma'arif NU Surabaya yang diberi mandat untuk membentuknya berhasil mendirikan PC Pergunu Surabaya pada 1 Mei 1958. Pimpinan Pusat Pergunu berhasil dibentuk pada 14 Februari 1959.

k. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama (Ishari NU)

Ishari NU merupakan banom yang melaksanakan kebijakan NU dalam pengembangan budaya seni hadrah dan shalawat.

l. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama

Banom ini lahir sebagai pelaksana kebijakan NU untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Organisasi ini didirikan pada Muktamar NU ke 33 tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur.

4.2.3.2 Lembaga-Lembaga di Bawah Naungan PWNU Lampung

a. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama

Lembaga yang dibuat untuk membantu tugas PWNU Provinsi Lampung sebagai amanat konferensi wilayah Lampung dalam bidang pertanian dengan diketuai oleh Ir. H. Midi Iswanto, MH, sekretaris Muhammad Asyihin, S. Pd., MM.

b. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian isu-isu strategis dan pengembangan sumber daya manusia untuk transformasi sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Lakpesdam lahir pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur tahun 1984. Lakpesdam

NU Lampung saat ini diketuai oleh Dr. Rudy., LL. M., LL. D, Sekretaris Dr. Idrus Ruslan, MA, Bendahara Anisa Munfaati, SE

c. Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU)

RMINU merupakan asosiasi pondok pesantren yang berafiliasi dengan NU. Lembaga yang lahir pada Mei 1954 oleh KH Ahmad Syaichu dan KH Idham Kholid ini bertugas untuk melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Untuk Provinsi Lampung diketuai oleh H. Hisyamudin, Dewan Penasihat diantaranya adalah KH. RM Sholeh Bajuri, S.HI., M.HI, KH. Ridwan Syuaib, KH Sya'ron, KH. Ahmad Ma'sum Abror dll

d. Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama

Lembaga ini bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum, pada saat ini LPBHNU Lampung diketuai oleh Yudi Yusnandi, S.H, M.H, Sekretaris Tomi Samantha, SH, Bendahara Khalida, S.H, M.H. Med

e. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU)

Lembaga ini bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. LTNNU merupakan rekomendasi dari Muktamar NU Ke-27 di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. Kehadiran lembaga ini untuk mensosialisasikan hasil-hasil muktamar, khususnya mengenai khittah 1926. Untuk LTNNU Lampung sendiri diketuai oleh Fadilasari, sekretaris Hilyatu Aini, Bendahara Juhrotul Khulwah

f. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Lembaga ini bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya. Lembaga ini dikenalkan dengan nama NU Care-Lazisnu sebagai rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal lembaga yang lahir dari Mukhtamar NU ke-31 tahun 2004 di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU Care-Lazisnu secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada masyarakat luas. LAZIZ NU Provinsi Lampung diketuai oleh Hasanudin Errezha, M.Pd.i, sekretaris Tajudin Nur, M.Sos, Bendahara Muhsani

g. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU)

Lembaga ini bertugas untuk membahas persoalan dan permasalahan tematik (maudluuiyah) dan aktual (waqiiyah) yang akan menjadi bahan keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama LBMNU Provinsi Lampung diketuai oleh KH. Munawir, S.Pd, sekretaris Ustadz Ahmad Rifa'i. M.Pd, bendahara KH. Rusydi Ubaidillah Abror, S.Pd

h. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi)

Lesbumi ini lahir dari tangan dingin para budayawan Nahdlatul Ulama seperti Usmar Ismail, Jamaluddin Malik, dan Asrul Sani pada 28 Maret 1962. Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan seni dan budaya. Lesbumi Lampung diketuai oleh KH. Dr.Drs. Musthopa Wagianto, S.H, M.H, sekretaris Khoiril Anwar. M.Pd.,

i. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)

Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga, sosial, dan kependudukan. LKKNU berdiri pada tanggal 17 Dzul Hijjah 1397 H, bertepatan dengan tanggal 7 Desember 1977 M di Jakarta. LKKNU Lampung diketuai oleh Dra Jauharo Haddad, M.M, sekretaris Ayu Mega Sari, bendahara Cahyati Setiani

j.Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)

Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. LDNU memiliki badan otonom, yakni Muallaf Center yang menjadi pusat pembelajaran para muallaf mengingat banyaknya orang yang masuk Islam melalui bimbingan NU dan Jamiyah Ruqyah Aswaja sebagai lembaga pengobatan alternatif. LDNU Lampung diketuai oleh Dr. KH. A. Bukhari Muslim, Lc., M.A, sekretaris Dr. Muallimin, M.Pd.I, bendahara Dr. Ade Imelda Frimayanti, M.Pd.

k. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU)

Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan Masjid. LTMNU didirikan pada 12 Dzulhijjah 1390 atau 9 Februari 1971 di Surabaya dengan nama Hai'ah Ta'miril Masjid Indonesia (HTMI). Sebelum berubah menjadi LTMNU pada Muktamar NU Ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, tahun 2010, lembaga ini juga pernah bernama Lembaga Takmir Masjid Indonesia (LTMI) pada Muktamar NU ke-31 di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah tahun 2004. LTMNU Lampung diketuai oleh Dr. Yazid jayanegara, sekretaris H. Pernawirawan, S.Ag, bendahara M. Lukmanul Hakim, SQ, MPd.

Semua lembaga dan badan otonom yang dimiliki Nahdlatul Ulama semuanya memiliki peran dan kewajiban masing masing dalam memberdayakan umat di berbagai sektor dengan berbagai metode pendekatan yang diharapkan itu semua membuat masyarakat lebih maju dan berkembang.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data penelitian terkait upaya kontra radikalisme di Provinsi Lampung melalui pemberdayaan masyarakat serta melihat faktor penyebab radikalisme agama di Provinsi Lampung maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab radikalisme di Provinsi Lampung terbagi atas faktor ideologi dan faktor geografis wilayah Provinsi Lampung. Radikalisme agama di Provinsi Lampung memiliki sejarah panjang yang mengakibatkan munculnya embrio-embrio radikalisme khususnya agama terus berkembang di Provinsi Lampung, salah satunya adalah peristiwa atau tragedi Talang Sari di Lampung Timur. Peristiwa tersebut merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah serta aparat militer pada Orde Baru yang dilakukan kepada kelompok pengajian Warsidi yang dianggap berafiliasi dengan kelompok Abdullah Sungkar pimpinan dari organisasi Islam radikal Jamaah Islamiyah yang sampai saat ini masih memproduksi dan mencetak para teroris-teroris baru yang siap mati atas nama jihad dan berharap mati dalam keadaan yang baik. Peristiwa tersebut menurut data yang dikumpulkan oleh peneliti menjadi salah satu faktor mengapa Provinsi Lampung memiliki serta berpeluang besar dalam penyebaran ideologi Islam radikal karena ada sejarah panjang terkait hal tersebut yang sampai saat ini memberikan semangat untuk para kelompok dan organisasi Islam radikal semangat dalam menyebarkan paham tersebut karena adanya perasaan senasib sepenanggungan serta

adanya sentiment terhadap pemerintah yang kerap dianggap *thagut* dalam melukai dan mendzalimi identitas sebagai seorang muslim hal tersebut berakibat penyebaran paham semakin massif dilakukan di wilayah Provinsi Lampung.

Faktor penyebab radikalisme di Provinsi Lampung juga berkaitan dengan kondisi geografis wilayah Provinsi Lampung serta kondisi yang berkaitan dengan faktor kependudukan yang beraneka ragam di Lampung terkait agama, dan suku bahkan lebih luas lagi. Secara geografis Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang strategis menjadi jalur persimpangan antara dua pulau antara Sumatera dengan Pulau Jawa, disamping itu Provinsi Lampung memiliki wilayah yang luas yang memungkinkan para kelompok dan organisasi yang sudah terapar paham ideologi Islam radikal massif menyebarkan dan mendakwahkan Islam yang keras dengan memanfaatkan kondisi geografis wilayah Lampung, yang mengakibatkan wilayah Provinsi Lampung amat sangat mudah dijadikan tempat yang sangat cocok dan sesuai untuk para kelompok dan organisasi Islam radikal.

Multikultural nya penduduk Lampung juga salah satu faktor penyebab mudahnya ideologi Islam radikal di Lampung berkembang, banyaknya konflik yang membawa nama agama, suku yang banyak terjadi di Provinsi Lampung menjadi hal buruk apabila dibiarkan begitu saja dan tidak dicarikan solusi terbaik antara dua kubu berseteru. Prinsip Pluralisme dalam menghadapi perbedaan di Provinsi Lampung sudah dilaksanakan akan tetapi masih jauh dari realita yang ada dengan adanya beberapa dialog antar agama, suku nyatanya belum dapat merubah stigma kelompok dalam menilai kelompok lain di luar komunitasnya. Masalah terkait SARA akan menyulut dan membuat api permusuhan di tengah organisasi masyarakat selalu ada bahkan membara dan dapat menjadi sebab awal radikalisme atas nama agama jika kelompok dan seluruh elemen masyarakat diam bahkan tidak peduli akan masalah terkait mudarnya

nilai pluralisme di junjung dan dijiwai oleh semua pihak dan elemen masyarakat.

2. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PWNU Provinsi Lampung melalui lembaga dan badan otonom yang berada di bawah naungannya terdiri atas dua aspek yang pertama adalah kaderisasi yang dilakukan lembaga, maupun badan otonom di bawah naungan PWNU Provinsi Lampung baik meliputi kaderisasi formal maupun non formal, lalu yang ke dua adalah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa pembekalan keterampilan yang diadakan dengan peluru tempur berada di badan otonom beserta lembaga seperti Gerakan Pemuda Anshor, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, PMII serta lembaga-lembaga yang fokus terhadap pengembangan masyarakat seperti LAKSPESDAM yang banyak melakukan pemberdayaan di tingkat masyarakat kelas bawah seperti pendampingan dan pemberian ketrampilan kepada beberapa peternak bebek bahkan isteri para nelayan untuk dapat mengembangkan dan menaikkan nilai jual barang. LAKSPESDAM juga melakukan pendampingan dan pemberian pelatihan kepada keluarga korban eks Talang Sari untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya serta membuat perkembangan di tengah masyarakat dan kelompoknya. PWNU Provinsi Lampung dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat baik melalui kaderisasi di setiap banom dan lembaga serta jenjang kaderisasi di dalam tubuh NU sendiri selalu memasukan ideologi Islam ala Aswaja Annahdliyyah yang moderat dan menjunjung tinggi pulralisme untuk terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera, dan NU dapat menjadi organisasi yang dapat membantu memecahkan masalah d berbagai aspek kehidupan baik agama, sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya.

Melalui pemberdayaan masyarakat yang berorientasi terhadap kemajuan suatu umat tersebut diharapkan dapat berperan dan menjadi upaya kontra radikalisme di tengah masyarakat yang berasal dari ketimpangan sosial

yang timbul akibat tidak meratanya keadilan dan pendistribusian aset negara kepada masyarakat. Menggunakan *welfare approach* juga menjadi cirri dalam penelitian ini pendekatan ini menekankan kepada peningkatan kehidupan sejahtera bagi masyarakat dengan ditempuh melalui pemberdayaan masyarakat dengan menggabungkan beberapa pendekatan seperti agama, sosial, ideologi bahkan budaya, organisasi masyarakat sipil seperti Nahdlatul Ulama mengambil peran tersebut sebagai salah satu kewajiban sebagai warga bangsa dalam menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sejak awal berdiri NU membersamai negara ini dan sampai saat ini NU terus berusaha dalam mengisi kemerdekaan dan merawatnya salah satu upaya menjadi sumber jawaban ummat khususnya Indonesia dalam berbagai bidang.

6.2 Saran

1. Kepada Masyarakat

Keterlibatan masyarakat untuk ikut serta memerangi perkembangan paham radikalisme harus dimaksimalkan dengan berbagai pengetahuan dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan menumbuhkan semangat pluralisme dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghargai perbedaan dan terus merawatnya dalam semangat Bhineka Tunggal Ika dan menjunjung tinggi nilai nilai Pancasila agar tercapai masyarakat yang paripurna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung

PWNU Provinsi Lampung bersama dengan badan otonom dan lembaga-lembaga di bawah naungannya diharapkan dapat memaksimalkan program-program yang ada terkhusus bagi masyarakat, banyak sekali badan otonom maupun lembaga yang belum secara maksimal memberikan dan mengeluarkan potensi yang seharusnya bisa dan dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Lampung. Satu lagi adalah

terkait NU Sebagai *civil society* juga harus lebih memberikan kebermanfaatan yang lebih besar bukan hanya untuk para pengikutnya saja akan tetapi masyarakat umum khususnya masyarakat Lampung.

3. Kepada Pemerintah

Pemerintah diharapkan mendukung dengan melalui berbagai aspek dan regulasi yang terkait dengan upaya kontra radikalisme agama khususnya di Provinsi Lampung melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini jika dapat dimaksimalkan akan tumbuh dua hasil yakni kontra radikalisme serta kesejahteraan di masyarakat akan terus berkembang dan mengurangi tingkat ketimpangan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2016). Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis. *Jurnal Addin* , Vol.10, No. 1, 5.
- Adityo, R. D. (2017). Geneologi Nilai-Nilai Islam dalam Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Fikri* , 3.
- Aisy, B. R., & Dina Oktarina Ibrahim, K. K. (2019). Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Untuk Menangkal Radikalisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus* , Vo. II, N. 2, 6.
- Ali, A. S. (2019). *Islam Pancasila dan Kerukunan Berbangsa*. Bandung: LP3ES.
- Anwar, H. (2015). *Organisasi Nahdlatu Ulama Memerangi Radikalisme Politik Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Arif, S. (2016). Islam, Radikalisme dan Deradikalisasi Berbasis Pancasila. *Societas DEI* , Vol. 3, No. 2.
- Arifin, S. (2014). Membendung Arus Radikalisasi di Indonesia. *Jurnal Studi Keislaman* , Vol 8, No 2, 8.
- Arsam. (2013). Nahdlatul Ulama dan Wacana Radikalisme Agama (Analisis Terhadap Majalah Risalah tahun 2011-2012). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* , Vol. 7, No. 1.
- Arya, A. *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Asrori, A. (2015). Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* , Vol. 9, No. 2.
- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Azzuhri, M. (2012). Konsep Multikulturalisme Dan Pluralisme Dalam Pendidikan (Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama dalam Ranah Ke Indonesiaan). *Jurnal Forum Tarbiyah* , Vol. 10, No. 1, 3.
- Budiarjo, M. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.

- Budiarjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ecoll, J. M., & Saidi, H. (1990). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Farih, A. (2019). Konsistensi Nahdlatul Ulama' dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik. *Jurnal Politik Walisongo* , Vol. 1, No.1.
- Farih, A. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* , Vol. 24, No. 2.
- Gilang, M. I. (2018). Dasar Negara Islam Atau Pancasila : Sikap Politik Partai Nahdlatul Ulama Dalam Majelis Konstituante. *Jurnal Candrasangkala* , Vol. 4, No. 1.
- Hambali, H. d. (2018). Transformasi NU di Indonesia: upaya menghilangkan polemik di tengah perubahan politik. *Jurnal Ar Rainy* , Vol. 20, No. 1.
- Hardani, & dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hasyim, F. (2018). *Peran Organisasi NU dalam Menangkal Ideologi Islam Radikal (Studi Organisasi di PWNNU Provinsi Lampung)*. Lampung: Universitas Lampung.
- Hasyim, Fuad. (2019). *Peran Organisasi NU dalam Menangkal Ideologi Islam Radikal*. Lampung: Universitas Lampung.
- Hertanto, Handi Mulyaningsih, Arizka Warganegara. (2021). Solidaritas Sosial dan Integrasi Sosial: Perspektif Mahasiswa FISIP Universitas Lampung. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* , Vol.23, No.2, 8.
- Hertanto, Handi Mulyaningsih, Asep Nurjaman. (2021). National Insights and Youth Political Attitudes in Rural Lampung Against Negative Campaign. *Journal of Government and Civil Society* , Vol. 5, No.2.
- Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives Vision*. Sydney: Addison Wesley Longman Pty Ltd.
- Hilmy, M. Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru. *MIQOT* , Vol. XXXIX, No. 2.
- Irhandayaningsih, A. (2012). Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia. *Jurnal Humanika* , 5.
- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.

- Jazuli, A. (2016). Strategi Pencegahan Radikalisme dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* , 202.
- Junian Hijry Minarva, B. (2016). Inisiasi Gerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh Tahun 1950-1953 Dalam Perspektif. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* , Vol. 1, No. 10.
- Khamid, N. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Journal Of Islamic Studies and Humanities* , Vol. 1, No.1.
- Kusumo, R. (2018). Populisme Islam di Indonesia:Studi kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPf-MUI Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik* , Vol. 4, No. 1.
- Kuswanjono, A. (2006). Pluralisme Pancasila. *Jurnal Filsafat* , Vol. 39, No.1, 5.
- Latif, Y. (2020). Wawasan Pancasila.
- Makmun, M., & Saddat, M. A. (2019). Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZIZ NU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* , Vol. 4, No. 2, 8-9.
- Melisa, V. F. (2018). Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Menarik Minat Pengunjung Objek Wisata Pantai Solob. *JOM FISIP* , Vol. 5 No. 1, 4.
- Minarva, J. H., & Bukhari. (2017). Inisiasi Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh Tahun 1950-1953 Dalam Perspektif Pergerakan Sosial. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unsyiah* , 3.
- Mubarok, M. Y. (2019). Bentuk Pemerintahan Islam Perspektif NU Dalam Keindonesiaan. *Annual Conference For Muslim Scholar* .
- Mubarok, M. Z. (2015). Dari NII ke ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan Dalam Islam di Indonesia Kontemporer. *Jurnal Pengembangan Islam* , 81.
- Mubarok, M. Z. (2015). Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer. *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* , Vol. 10, No. 1.
- Mukhlis, M., & Mustofa, I. (2020). *Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme Berbasis Pondok Pesantren*. Yogyakarta: IDEA Pres Yogyakarta.
- Nurjannah. (2013). Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah. *Jurnal Dakwah* , Vol. XIV, No. 2.
- P., H. H. (2017). Politik Islam Indonesia (Memahami Nomokrasi Islam dalam Dinamika Politik Kebhinekaan Indonesia). *Jurnal Studi Islam* , Vol. 2, No. 2.

- Prasetyo, Hendro; Ali Munhanif, dkk. (2002). *Islam & Civil Society*. Jakarta, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Qodir, Z. (2014). *Radikalisme Agama di Indoensia Pertautan Ideologi Politik Kontemporer dan Kekuasaan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, N. K. (2018). *Negara Bukan Bukan (Prisma Pemikiran Gus Dur tentang Negara Pancasila)*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Robingaton. (2017). Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan. *Jurnal Emprisma* , Vol. 26, No. 1.
- Robingaton. (2017). Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan. *Empirisma* , Vo. 26, No.1, 101.
- Saifuddin. (2011). Radikalisme di Kalangan Mahasiswa. *Analisis* , Vol. XI, No. 1.
- Saputra, I. (2019). Resolusi Jihad : Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka. *Jurnal Islam Nusantara* , Vol. 3, No. 1.
- Sari, S. N. (2016). *Strategi BNPT dalam Upaya Deradikalisasi Pemahaman Narapidana Terorisme Lembaga Pemasyarakatan Cipinang*. Tangerang, Banten: UIN SYarif Hidayatullah Jakarta.
- Sarwono. (2011). *Psikologi Rmaja Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Prakarsa.
- Setiadi, O. (2019). Gerakan Islam Politik: Problem Ideologi Radikal, Global Jihad, dan Teroridme Keagamaan. *Jurnal Kajian Poitik Islam* , Vol. 2, No. 1.
- Sitompul, E. M. (1989). *NU dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka sinar Harapan .
- Soekanto, S. (2009). *Peranan Sosiologi SUatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soraya, A. (2019). Jalan Panjang Penumpasan Pemberontakan DI/TII Jawa Barat, 1949 – 1962. *Jurnal Middle East and Islamic Studies* , Vol. 6, No. 1.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat:Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif, dan Konsturktif*. Bandung: ALVABETA CV.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

- Sukayat, T. (2018). Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah Hisbah Front Pembela Islam. *Jurnal UIN SGD* , Vol. 12, No. 1, 6-7.
- Syafar, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Untuk Menangkal Radikalisme Islam di Banten. *Jurnal UIN Sultan Maulana Hasanudin* , 5.
- Syamsudin, M., & Muh, F. (2010). Dinamika Islam Pada Orde Baru. *Jurnal Dakwah* , 145-146.
- Tambunan, W. I. (2014). Gerakan Politik S.M. Kartosoewirjo (DI/TII 1949-1962). *Jurnal Politea* , Vol. 6, No.1.
- Taufani. (2018). Pemikiran Pluralisme Gus Dur. *Jurnal Tabligh* , Vol. 19, No.2.
- Umar, A. R. (2010). Melacak Akar Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , Vol. 14, No. 2.
- Umar, A. R. (2010). Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , Vol. 14, No. 2.
- Umar, N. (2019). *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Usman, S. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, M. A. (2018). Fundamentalisme dan Radikalisme Islam (Telaah Kritis Tentang Eksistensinya Masa Kini). *Sulesena* , Vol.12, No.1, 69-70.
- Wahid, M. A. (2018). Fundamentalisme dan Radikalisme Islam (Telaah Kritis Tentang Eksistensinya Masa Kini). *Sulesena* .
- Wahyunanto, E. D., & Arik Dwijayanto, S. W. (2021). Gus Dur dan Civil Society: Peran KH Abdurahman Wahid dalam Pemberdayaan Masyarakat. *AICOMS* , 8.
- Yusuf, M. (2018). *Masyarakat Madani dan Civil Society Perspektif PWNNU Provinsi Jambi*. Jambi: UIN Sultan Tha Syaifuddin.
- Zumaidi, Z. (2010). Islam dan Pancasila: Pergulatan Islam dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal. *Kontekstualita* , Vol.25, No.2.